



Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Willem A.S. No. 9, Palangkaraya 73111

Telp. (0536) 3221293 Fax. (0536) 3229809, 3220819

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas publik dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini juga merupakan media informasi publik tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kinerja yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (*performance indicators*).

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Kepala Daerah yang termuat di dalam Renstra dalam mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang konstruktif guna bahan evaluasi dan menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang.



Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Palangka Raya, Januari 2024



KEPALA DINAS,

IF. RIZA RAHMADI, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 9640723 199003 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas publik dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dan evaluasi atas perjanjian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 14.790.575.117,- dan Belanja Modal Rp. 92.120.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 akibat adanya peningkatan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, anggaran mengalami penyesuaian untuk menunjang Pengendalian Inflasi Daerah dalam usaha untuk menstabilkan daya beli masyarakat melalui pasar penyeimbang, sehingga anggaran menjadi Rp. 14.882.695.117,-.

1. Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan APBD Perubahan Tahun 2023

URAIAN	TARGET (Rp.)	PERSENTASE
Belanja Operasi		
- Belanja Pegawai	6.657.885.500,-	44,74 %
- Belanja Barang Jasa	8.132.689.617,-	54,65 %
Belanja Modal	92.120.000,-	0,62 %
JUMLAH	14.882.695.117,-	

2. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Dinas Ketahanan Pangan memiliki sasaran Rencana Strategis yaitu : Menurunnya Disparitas Kemiskinan Desa dan Kota, sehingga anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2023 ini seluruhnya dialokasikan untuk mencapai target sasaran tersebut.

No.	SASARAN	ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Menurunnya Disparitas Kemiskinan Desa dan Kota	14.882.695.117,-	100 %	-
Jenis Belanja / Program				Anggaran (DPPA-SKPD)
PENDAPATAN				Rp. 13.500.000,-
BELANJA OPERASI				Rp. 4.790.575.117,-
Belanja Modal				Rp. 92.120.000,-

Analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dinas Ketahanan Pangan memiliki 4 (Empat) sasaran strategis dalam Dokumen Perjanjian Kinerja sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun evaluasi dan analisis sasaran strategis secara rinci akan diuraikan di bawah ini.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Dokumen Renstra (Target Tahun 2023)	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	(%)
1.	Terwujudnya Pemanfaatan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi	Ton	60,5	119,83	198
		b. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras	%	≤ 5	2,40	48
		c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)				
		- Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Kkal/Kapita/Hari	2.625	2.562	97,6
		- Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Gram/Kapita/Hari	63	142,29	225,86
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	Skor	90,4	88,3	97,7
		b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kelompok	22	4	18

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Dokumen Renstra (Target Tahun 2023)	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	(%)
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	%	90,5	90	99,6
		b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	Pelaku	260	365	140,38
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	%	≤ 20	1,47	1,47
		b. <i>Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)</i>	%	≤ 20	1,47	1,47

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, penghitungan efisiensi yang didapatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebesar 6,80 %. Sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017 Tahun 2017, bahwa batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%, maka dapat dikatakan penggunaan sumber daya di Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam kategori **Efisien**. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah secara efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada Tahun 2023. Dengan skala persentase efisiensi berada diangka 67,00 %.

Hasil kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 disajikan dalam perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dari Total Pagu Anggaran **Rp. 14.882.695.117,-** adalah sebesar **Rp. 13.870.902.223,-** dengan jumlah persentase realisasi **93,20 %**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ...	2
D. KEPEGAWAIAN	3
E. SARANA DAN PRASARANA	5
F. ISU-ISU STRATEGIS	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. PERENCANAAN STRATEGIS	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	18
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
B. REALISASI ANGGARAN	71
BAB IV PENUTUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai dengan Desember 2023 pada Golongan/Ruang Kepangkatan	4
Tabel I.2.	Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai dengan Desember 2023 dari tingkat pendidikan	4
Tabel I.3.	Sarana dan Prasarana Perkantoran	5
Tabel II.1.	Ringkasan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026	13
Tabel II.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	14
Tabel II.3.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	15
Tabel II.4.	Sasaran Strategi Dinas Ketahanan Pangan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	18
Tabel III.1.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	21
Tabel III.2.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022 dan Tahun 2021	23
Tabel III.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis	24
Tabel III.4.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi Tahun 2022 dan Tahun 2023	26
Tabel III.5.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Koefisien Varian Harga Beras Tahun 2022 dan Tahun 2023	28
Tabel III.6.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2022 dan Tahun 2023	31
Tabel III.7.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	32
Tabel III.8.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) Provinsi Kalimantan Tengah.....	35
Tabel III.9.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sampel Pangan Segar Provinsi Kalimantan Tengah	38
Tabel III.10.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Pangan Asal Tumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah.....	39
Tabel III.11.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Provinsi Kalimantan Tengah	41
Tabel III.12.	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Kalimantan Tengah.....	43

Tabel III.13.	Analisis Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	46
Tabel III.14.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	50
Tabel III.15.	Program Penunjang Keberhasilan Kinerja Tahun 2023 dan Target Renstra 2026	70
Tabel III.16.	Realisasi Pelaksanaan Program APBD Dinas Ketahanan Pangan	72
Tabel III.17	Realisasi Anggaran per Program dan Per Kegiatan	73
Tabel IV.1	Capaian Per Jenis Belanja dan Pendapatan	78



DAFTAR GAMBAR



Gambar III.1 Komposit FSVA	43
----------------------------------	----



DAFTAR GRAFIK

Grafik III.1. Rata-rata Harga Per Bulan Tingkat Eceran Tahun 2023	29
Grafik III.2. Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2021 s.d 2023.....	72
Grafik III.3. Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran	58

Lampiran 2. Foto Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan

A. Kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Foto Kegiatan Sosialisai Pangan B2SA



Kegiatan Promosi Percepatan Diversifikasi Pangan Masyarakat/P2KP



B. Kegiatan Bidang Distribusi Pangan

Kegiatan Tim Sagtas Ketahanan Pangan dan TPID



Kegiatan Distribusi Pangan



Kegiatan Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi



C. Kegiatan Bidang Ketersediaan Pangan

Foto Kegiatan Bidang Ketersediaan Pangan



LAMPIRAN 4. INSTRUMEN PENDUKUNG KINERJA

SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD-RI)

Beranda Hot-line CS +6281317633727 Email sipd@kemendagri.go.id

Selamat Datang di,



SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Republik Indonesia

Solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi dan
transparansi dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan
daerah.

Informasi Aplikasi

Pelajari cara kerja Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
dengan mudah melalui beberapa video panduan berikut

Unduh

LAYANAN ✓



INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.



INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.



INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH LAINNYA

Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.



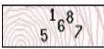
e-SAKIP

Login

USERNAME

PASSWORD

Kode Captcha



Jika kode Captcha terlihat tidak jelas, klik **REFRESH**

Bantuan **Login**

Copyright 2017 Kementerian PANRB

e-SAKIP REVU

e-SAKIP REVU adalah sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sistem ini bertujuan sebagai sarana pembinaan interaktif pelaksanaan Akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan sarana penyampaian laporan kinerja secara online.



A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, maka Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah untuk dapat memberikan mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yangtelah ditetapkan yang harus disusun pada setiap akhir tahun anggaran. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mendorong Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan

pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentralisasi di bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian;
- b. Bidang Ketersediaan Pangan;
- c. Bidang Distribusi Pangan;
- d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Ketahanan Pangan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan standard pelayanan dibidang ketahanan pangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan, organisasi, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan program ketahanan pangan ;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan analisis, pembinaan penerapan standard teknis dibidang ketahanan pangan ;
- d. Koordinasi dan pembinaan penerapan standard pelayanan ketahanan pangan ;
- e. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, fasilitasi ketahanan pangan;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan;
- g. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas.

D. KEPEGAWAIAN

Sumber daya manusia Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan akhir Desember 2023 berjumlah 45 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian 21 orang pegawai laki-laki dan 24 orang pegawai perempuan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah dengan pangkat dan golongan sampai dengan Desember 2023, seperti pada tabel berikut :

Tabel I. 1
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Desember 2023 pada Golongan/Ruang Kepangkatan

No.	Golongan/Ruang Kepangkatan	Tahun 2023	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Madya	1 orang	-
2.	Pembina Utama Muda – IV/c	1 orang	1 orang
3.	Pembina Tk. I - IV/b	2 orang	3 orang
4.	Pembina - IV/a	4 orang	1 orang
5.	Penata Tk. I - III/d	3 orang	4 orang
6.	Penata - III/c	2 orang	3 orang
7.	Penata Muda Tk.I - III/b	7 orang	9 orang
8.	Penata Muda - III/a	- orang	1 orang
9.	Pengatur Tingkat I - II/d	1 orang	2 orang
JUMLAH		21 orang	24 orang

Sumber data : Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah terhitung sampai dengan Desember 2023 seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel I. 2
Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Desember 2023 dari tingkat pendidikan

No.	Uraian	Tahun 2023
1.	Pendidikan Pasca Sarjana (S2)	15 orang
2.	Pendidikan Sarjana (S1)	19 orang
3.	Pendidikan Sarjana Muda/ D3	3 orang
4.	Pendidikan SLTA/Sederajat	8 orang
Jumlah		45 orang

Sumber data : Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Jumlah non ASN (pegawai kontrak) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 12 orang tenaga kontrak, dengan rincian :

1. administrasi 4 orang.
2. Satuan Pengamanan 1 orang.
3. Jaga malam 2 orang.
4. Cleaning service 2 orang.
5. Kebersihan halaman kantor 2 orang.
6. Sopir 1 orang.

Dengan jumlah personil yang ada, baik ASN maupun non ASN, maka semua beban pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan kemampuan teknis bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah telah mengikutsertakan sejumlah pegawai dalam diklat umum maupun teknis seperti kursus/pelatihan Penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA), Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Analisis Ketahanan Pangan dan Analisis Mutu Pangan. Demikian pula untuk mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan peningkatan kualitas pegawai telah mengikutsertakan dalam kegiatan workshop Perencanaan, Bintek Pengelolaan Keuangan, Bintek Kepegawaian.

E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka menyelenggarakan operasional pelaksanaan kegiatan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi :

Tabel I. 3
Sarana Dan Prasarana Perkantoran

NO.	JENIS ASET	JUMLAH	SATUAN
1	A.C. Split	35	unit
2	A.C. Window	7	unit
3	Alat Dapur lainnya	3	unit
4	Alat Kantor Lainnya	7	unit

NO.	JENIS ASET	JUMLAH	SATUAN
5	Alat keamanan lainnya	2	unit
6	Alat komunikasi telephone lainnya	9	unit
7	Alat Pemadam/Portable	3	unit
8	Alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya	2	unit
9	Alat Rumah Tangga Lain-lain	21	unit
10	Aset Renovasi	5	unit
11	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain	2	unit
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2	unit
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14	unit
14	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	unit
15	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain	1	unit
16	Brandkas	5	unit
17	Buku Umum Lain-lain	1	unit
18	Camera Electronic	3	unit
19	Camera Film	6	unit
20	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	2	unit
21	Facsimile	1	unit
22	Filing Cabinet Besi	24	unit
23	Gedung Garasi/Pool Permanen	4	unit
24	Gedung Pos Jaga Permanen	1	unit
25	Gerobak Tarik	2	unit
26	Hard Disk	1	unit
27	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang	2	unit
28	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Lain-lain	3	unit
29	Jalan Khusus Lainnya	1	unit
30	Jam Mekanis	14	unit
31	Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas Sedang	1	unit
32	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	1	unit
33	Jaringan Distribusi Tegangan Di atas 20 KVA	1	unit
34	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1	unit
35	Jaringan Transmisi Lain-lain	2	unit
36	Kipas Angin	7	unit
37	Kursi Besi/Metal	1	unit
38	Kursi Kayu	13	unit
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	6	unit
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	unit
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	unit
42	Kursi Putar	24	unit

NO.	JENIS ASET	JUMLAH	SATUAN
43	Kursi Rapat	108	unit
44	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	60	unit
45	Kursi Tamu	5	unit
46	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	unit
47	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	1	unit
48	Lap Top	27	unit
49	Layar Film/Projector	5	unit
50	Lemari Besi/Metal	3	unit
51	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	14	unit
52	Lemari Es	3	unit
53	Lemari Kaca	2	unit
54	Lemari Kayu	5	unit
55	Maket (Mock-up)	1	unit
56	Meja 1/2 Biro	5	unit
57	Meja Kerja Kayu	46	unit
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	unit
59	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	unit
60	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	unit
61	Meja Rapat Pejabat lainnya	18	unit
62	Mesin Absensi	3	unit
63	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	5	unit
64	Mesin Pemotong Rumput	5	unit
65	Meubeler lainnya	3	unit
66	Microphone Table Stand	1	unit
67	Microphone/Wireless MIC	2	unit
68	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	unit
69	Monitor	1	unit
70	Note Book	3	unit
71	P.C Unit	38	unit
72	Papan Nama Instansi	3	unit
73	Papan Pengumuman	41	unit
74	Papan Visual/Papan Nama	25	unit
75	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2	unit
76	Peralatan Cetak lainnya	26	unit
77	Peralatan Jaringan lainnya	8	unit
78	Peralatan Minikomputer lainnya	2	unit
79	Peralatan Personal Komputer lainnya	6	unit
80	peralatan studio audio lainnya	1	unit

NO.	JENIS ASET	JUMLAH	SATUAN
81	Personal Komputer lainnya	5	unit
82	Pick Up	1	unit
83	Printer (Peralatan Personal Komputer)	47	unit
84	Professional Sound System	1	unit
85	Rak Besi	3	unit
86	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	unit
87	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	1	unit
88	Scooter	1	unit
89	Sepeda Motor	26	unit
90	Sound System	1	unit
91	Tanaman Keras	1	unit
92	Tangga Aluminium	1	unit
93	Telephone (PABX)	3	unit
94	Televisi	5	unit
95	Tiang Bendera	25	unit

Sumber data : Subbagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

Kelengkapan. sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya, merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan.

F. ISU – ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Ketahanan Pangan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pengembangan pertanian keluarga dan pekarangan pangan mengintensifkan pelaksanaan pengembangan komoditas ketahanan pangan bagi keluarga yaitu sayuran dan unggas sebagai upaya peningkatan ketersediaan pangan yang merupakan salah satu komponen dari IKU Dinas Ketahanan Pangan.
- b. Upaya perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat menuju pola pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang merupakan salah satu indikator kinerja Sasaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang

tercantum dalam dokumen RPJMD 2022-2026, dimana Dinas Ketahanan Pangan adalah OPD utama penyokong sasaran tersebut.

- c. Pengawasan mutu dan keamanan pangan perlu terus dilakukan untuk menjamin kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
- d. Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi serta Akses Pangan untuk menjamin stok pangan dan stabilitas harga pangan yang dapat terjangkau.
- f. Analisis kerawanan dan kerentanan pangan sebagai langkah kewaspadaan dini terhadap kerawanan dan kerentanan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah juga menghadapi isu-isu dalam penyelenggaraan pembangunan, meliputi :

1. Alih fungsi lahan pangan untuk keperluan non pangan

Konversi lahan pangan ke penggunaan non pangan seperti kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan dan sarana publik dapat menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Bagi ketahanan pangan Nasional, konversi lahan sawah merupakan ancaman yang serius, mengingat konversi lahan tersebut sulit dihindari sementara dampak yang ditimbulkan terhadap masalah pangan bersifat permanen, kumulatif dan progresif. Dampak yang dihadapi yaitu penurunan lahan produktif pangan, banjir, kekeringan dan terjadi kerawanan pangan.

2. Perubahan iklim sulit diprediksi / iklim ekstrim

Perubahan iklim akan mempengaruhi hasil panen yang kemungkinan besar akan berkurang disebabkan oleh semakin keringnya lahan akibat musim kemarau yang lebih panjang. Pada skala yang ekstrim, berkurangnya hasil panen dapat mengancam ketahanan pangan. Hal ini dapat berujung pada kegagalan panen berkepanjangan yang juga menyebabkan pasokan pangan menjadi tidak pasti, fluktuasi harga pangan pokok, akses, distribusi dan keterjangkauan serta stabilitas harga pangan bagi masyarakat tidak merata.

3. Krisis ekonomi Global dan Nasional

Krisis ekonomi Global merupakan peristiwa dimana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya diseluruh dunia. Krisis ekonomi Global dan Nasional sangat berpengaruh

terhadap harga ketahanan pangan dan berpengaruh pada tingkat ketersediaan pangan.

4. Tingkat konsumsi pangan masyarakat terhadap beras yang masih cukup tinggi

Beras telah lama menjadi komoditas pangan yang paling pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bahkan, beras pun akhirnya menjadi *“food habit”* sehingga masyarakat beranggapan bahwa belum makan dikatakan maka kalau belum makan nasi. Hal ini membuat kualitas konsumsi pangan masyarakat relatif rendah jika masih kertegantungan dengan beras saja. Padahal masih banyak komoditas pangan lainnya yang dapat dikonsumsi dengan gizi yang baik, berimbang dan aman untuk dikonsumsi.

5. Resiko keamanan pangan segar

Keamanan pangan menjadi salah satu komponen utama kebijakan pangan. Di Indonesia sendiri masalah keamanan pangan menjadi suatu hal yang memprihatinkan karena masalah keamanan pangan tersebut berpengaruh besar bagi kehidupan manusia terutama dalam bidang kesehatan. Harga pangan yang mahal membuat oknum yang tidak bertanggungjawab akhirnya melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi mereka yakni menambah pendapatan namun merugikan bagi masyarakat yakni mengakibatkan masyarakat keracunan pangan. Keamanan pangan / kualitas pangan kini menjadi tolak ukur manusia dalam memenuhi kebutuhan pangannya agar sesuai dengan pemenuhan nutrisi dan gizi dalam tubuh.

6. Minat generasi muda terhadap pertanian rendah

Membudayanya pandangan petani sebagai pekerjaan kelas dua, disamping masih sempitnya kesadaran dan pemahaman akan potensi pertanian membuat minat generasi muda terhadap pertanian rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa daya tarik sektor pertanian di Indonesia masih lemah, sehingga banyak lulusan sarjana pertanian yang kurang tertarik terjun ke bidang tersebut padahal lahan yang tersedia cukup luas. Hal itu terjadi karena paradigma belum berubah, seolah-olah sarjana kerjanya di instansi pemerintah. Padahal,

lahan pertanian harus menjadi lokomotif ekonomi yang dapat menghela aneka keahlian lainnya.

7. Tingkat penghasilan petani masih rendah

Indonesia sebagai negara berkembang hingga saat ini masih memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Dari masyarakat tingkat berpenghasilan menengah ke bawah di Indonesia, mayoritas didominasi masyarakat yang berprofesi sebagai petani akibat aktivitas perekonomian bertani yang masih rendah. Selain itu, mayoritas pendidikan para petani masih didominasi lulusan Sekolah Dasar (SD) dan jua lahan pengusahaan yang semakin sempit serta adanya sistem alih teknologi dan penyebaran teknologi masih rendah sehingga produktifitas dan nilai tambah produk juga rendah.

8. Akses, stabilitas harga dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat di pedesaan.

Akses, stabilitas dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat masih sering luput dari perhatian oleh karena itu diperlukan pemantauan terhadap sistem distribusi pangan kepada masyarakat pedesaan dan masih terdapat harga pangan yang tidak berfluktuasi bahkan harga terus semakin meningkat.

Tingginya harga pangan bagi masyarakat pedesaan sangat merugikan, terutama bagi masyarakat yang masih tingkat pendapatannya rendah dengan kemampuan daya beli yang rendah pula.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi Kepala Daerah dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam Tabel II.1, Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, maka Dinas Ketahanan Pangan mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah pada Misi 2, yaitu Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global.

Tabel II. 1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

Visi		Misi
Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis	1.	Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
	2.	Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
	3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
	4.	Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing
	5.	Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun anggaran adalah meningkatkan tingkat kondisifitas daerah melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan kemiskinan masyarakat.

b. Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Ketahanan Pangan dalam kurun waktu lima tahun yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Menurunnya Disparitas Kemiskinan Desa dan Kota, yang termuat dalam Tabel II. 2.

Tabel II.2
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Terakhir	Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah Provinsi	5,05	47,5	50,5	60,5	70,5	80,5	90,5	90,5	-
2	Koefisien varian harga beras / fluktuasi harga beras	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	-
3	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) :									-
	- Angka Ketersediaan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/Hari)	3.000	2.400	2.575	2.625	2.675	2.725	2.800	2.800	
	- Angka Ketersediaan Protein (AKP) (Gram/Kapita/Hari)	63	63	63	63	63	63	63	63	
4	Skor PPH provinsi Kalimantan Tengah	83,8	85,5	88,3	90,4	91	91,5	92	92	-
5	Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	30 kelompok	83 kelompok	20 Kelompok	22 kelompok	24 kelompok	26 kelompok	30 kelompok	202 kelompok	-
6	Persentase sejumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	88%	88,5%	90%	90,5%	91%	91,5%	92%	92%	-
7	Jumlah pelaku usaha pangan asal tumbuhan	245 pelaku	245 pelaku	250 pelaku	260 pelaku	265 pelaku	270 pelaku	275 pelaku	275 pelaku	-
8	Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) (%)	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	-
9	Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) (%)	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	-

3. Strategi, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Untuk Tahun 2023 telah menyesuaikan dengan nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 1 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pangan, yang terdiri dari 5 Program, 13 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan, yang dilaksanakan oleh 1 Sekretariat dan 3 Bidang.

Tabel II. 3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
			Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
			Penyelenggaraan Rapat

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan
			Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
			Koordinasi Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman B2SA

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Povinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten Kota	Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Provinsi
			Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Kabupaten Kota
			Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Dinas Ketahanan Pangan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Perjanjian kinerja dengan Target yang dapat terukur.

Tabel II. 4
Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Perjanjian Kinerja
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi	Ton	60,5
		b. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras	%	≤ 5
		c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)		
		- Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Kkal/Kapita/Hari	2.625
		- Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Gram/Kapita/Hari	63
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah		90,4
		b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kelompok	22
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	%	90,5
		b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	Pelaku	260
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	%	≤ 20
		b. Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	%	≤ 20

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni dalam Belanja Operasi sebesar Rp. 14.790.575.117,- dan Belanja Modal Rp. 92.120.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2023 akibat adanya peningkatan inflasi Provinsi Kalimantan Tengah, anggaran mengalami penyesuaian untuk menunjang Pengendalian Inflasi Daerah dalam usaha untuk menstabilkan daya beli masyarakat melalui pasar penyeimbang, sehingga anggaran menjadi Rp. 14.882.695.117,-.

1. Target Belanja Dinas Ketahanan Pangan APBD Perubahan Tahun 2023

URAIAN	TARGET (Rp.)	PERSENTASE
Belanja Operasi		
- Belanja Pegawai	6.657.885.500,-	44,74 %
- Belanja Barang Jasa	8.132.689.617,-	54,65 %
Belanja Modal	92.120.000,-	0,62 %
JUMLAH	14.882.695.117,-	

2. Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Dinas Ketahanan Pangan memiliki sasaran Rencana Strategis yaitu : Menurunnya Disparitas Kemiskinan Desa dan Kota, sehingga anggaran pada APBD Perubahan Tahun 2023 ini seluruhnya dialokasikan untuk mencapai target sasaran tersebut.

No.	SASARAN	ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Menurunnya Disparitas Kemiskinan Desa dan Kota	14.882.695.117,-	100 %	-
Jenis Belanja / Program				Anggaran (DPPA-SKPD)
PENDAPATAN				Rp. 13.500.000,-
BELANJA OPERASI				Rp. 4.790.575.117,-
Belanja Modal				Rp. 92.120.000,-

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi dilakukan diperoleh dengan melakukan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dengan rincian sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

Target dan realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III. 1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi	Ton	60,5	119,83
		b. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras	%	≤ 5	2,40
		c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)			
		- Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Kkal/Kapita/Hari	2.625	2.562
		- Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Gram/Kapita/Hari	63	142,29
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	Skor	90,4	88,3
		b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kelompok	22	4
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	%	90,5	90
		b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	Pelaku	260	365
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	%	≤ 20	1,47
		b. <i>Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)</i>	%	≤ 20	1,47

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN TAHUN 2023, TAHUN 2022 DAN TAHUN 2021

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah 3 (Tiga) Tahun terakhir mengacu pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dokumen Revisi Renstra 2021-2026 dengan perbandingan target dan realisasi kinerja disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel III. 2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, Tahun 2022 dan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi	Ton	80,8	11,3	50,5	55,57	60,5	119,83
		b. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras	%	≤ 5	1,18	≤ 5	1,79	≤ 5	2,40
		c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)	Doumen	1	1				
		- Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Kkal/Kapita/ Hari	-	-	2.575	3.071	2.625	2.562
		- Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Gram/Kapita/ Hari	-	-	63	102,53	63	142,29
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	Skor	94,1	83,8	88,3	87,2	90,4	88,3
		b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kelompok	35	83	20	31	22	4
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	%	90	88	90	90	90,5	90
		b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	Pelaku	245	248	250	250	260	365
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	%	-	-	≤ 20	1,47	≤ 20	1,47
			Dokumen	1	1				
		b. Analisis Food Security and Vulneraby Atlas (FSVA)	%	-	-	≤ 20	1,47	≤ 20	1,47
			Dokumen	1	1				

Pada tahun 2021 indikator target kinerja masih menggunakan satuan **Dokumen** :

1. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
2. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
3. Analisis Food Security and Vulneraby Atlas (FSVA)

3. ANALISIS PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

Tabel III. 3
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Dokumen Renstra (Target Tahun 2023)	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja
				Target	Realisasi	(%)
1.	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi	Ton	60,5	119,83	198
		b. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras	%	≤ 5	2,40	48
		c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)				
		- Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Kkal/Kapita/Hari	2.625	2.562	97,6
		- Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Gram/Kapita/Hari	63	142,29	225,86
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	Skor	90,4	88,3	97,7
		b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kelompok	22	4	18
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	%	90,5	90	99,6
		b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	Pelaku	260	365	140,38
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	%	≤ 20	1,47	1,47
		b. <i>Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)</i>	%	≤ 20	1,47	1,47

Analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dinas Ketahanan Pangan memiliki 4 (Empat) sasaran strategis dalam Dokumen Perjanjian Kinerja sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun evaluasi dan analisis sasaran strategis secara rinci akan diuraikan di bawah ini.

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan, Distribusi dan Akses Pangan

a. Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi

Ketersediaan pangan menjelaskan tentang jumlah bahan pangan yang tersedia di suatu wilayah. Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui produksi dalam negeri/daerah, pemasukan dari luar negeri/daerah serta cadangan yang dimiliki negeri/daerah yang bersangkutan. Untuk menjaga tingkat ketersediaan pangan di masyarakat maka harus diperhatikan angka kecukupan gizi dan pola pangan harapan, pola panen bulanan komoditas pertanian serta penyediaan pangan menjelang hari besar keagamaan. Untuk itu diperlukan suatu sistem pemantauan ketersediaan pangan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Melalui kegiatan *Analisis Ketersediaan Pangan Pokok* maka dapat diketahui surplus/defisit kondisi pangan di wilayah provinsi Kalimantan Tengah pada suatu waktu, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang menyangkut ketahanan pangan sehingga menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi banyak pihak.

Ketersediaan bahan pangan digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan selama setahun, dengan memberikan perhatian khusus untuk kebutuhan dan ketersediaan pada bulan-bulan menjelang HBKN sebagai bahan koordinasi dalam penyusunan kebijakan penyediaan pangan di Kalimantan Tengah.

Tabel III. 4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Cadangan Pangan Pokok
Pemerintah Provinsi Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran 1: Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan							
No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
1	Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah Provinsi	50,5	55,57	110	60,5	119,83	198

Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah Provinsi pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 119,83 Ton dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 hanya sebesar 60,5 Ton. Peningkatan signifikan ini terjadi karena pada Tahun 2023 tidak ada penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk melaksanakan penanggulangan rawan pangan paska bencana akibat bencana alam atau keadaan darurat. Peningkatan ini masih belum ideal dalam mencukupi stok cadangan pangan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah masih diperlukan penambahan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk mencukupi stok kebutuhan cadangan pangan ideal sesuai dengan jumlah penduduk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap penggunaan Cadangan Pangan (beras) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk penanggulangan rawan pangan paska bencana akibat bencana alam atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten/Kota penerima bantuan, serta sisa Cadangan Beras di gudang Perum Bulog Kanwil Kalimantan Tengah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Alternatif pemecahan masalah dengan menambah jumlah anggaran pembelian cadangan beras melalui pengadaan cadangan beras sehingga bisa mencukupi permintaan dari kabupaten/kota apabila terjadi inflasi ataupun terjadinya

bencana dan dapat mengembalikan keseimbangan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

b. Koefisien Varian Harga Beras/Fluktuasi Harga Beras

Antara Distribusi, harga dan akses pangan sangat berkaitan satu dengan lainnya. Kemampuan akses pangan yang cukup oleh setiap penduduk adalah salah satu prasyarat mutlak bagi terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Ketidakmampuan mengakses pangan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerawanan pangan. Masalah ini disebabkan oleh ketidakmampuan rumah tangga untuk :

- (a) memperoleh lapangan pekerjaan (mata pencaharian di sektor formal maupun informal dalam cakupan produksi rumah tangga,
- (b) hambatan ekonomi, yaitu *keterbatasan daya beli*,
- (c) ketidakmampuan memperoleh pangan dari sumber lain seperti bantuan pangan karena kesenjangan sosial.

Sistem distribusi produk pangan dari produsen sampai ke konsumen umumnya terdiri dari berbagai tingkatan (rantai) mulai dari pedagang pengumpul, pedagang pasar sampai tingkat pengecer dan masyarakat konsumen. Dalam rangka meningkatkan stabilitas harga maka perlu kiranya dilakukan pemantauan dan analisis harga pangan pokok di tingkat konsumen dengan tujuan stabilisasi harga pangan di Kalimantan Tengah dapat dikendalikan dan sebagai bahan analisis kebijakan pemerintah yang terkait dengan harga pangan pokok masyarakat.

Kondisi ketersediaan pangan berkaitan dengan faktor harga dan pasokan pangan itu sendiri. Harga dan pasokan pangan merupakan indikator-indikator strategis yang saling terkait, yang biasa digunakan untuk mengetahui status distribusi pangan. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan.

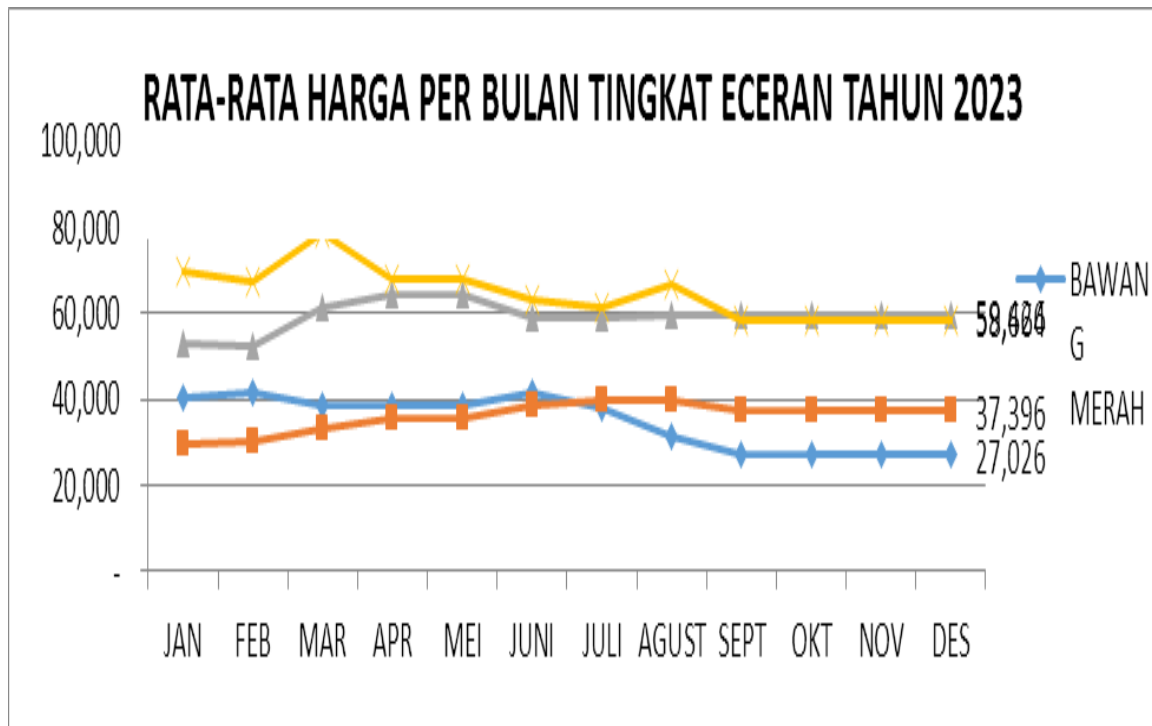
Tabel III. 5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Koefisien Varian Harga Beras
Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran 1: Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan							
No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Koefisien varian harga beras / fluktuasi harga beras	≤ 5	1,79	1,79	≤ 5	2,40	48

Kenaikan harga beras secara umum disebabkan permintaan yang meningkat pada saat menjelang dan pelaksanaan ibadah puasa serta hari raya keagamaan. Hasil analisis Coefisien Varian terhadap harga beras untuk Tahun 2022 sebesar 1,79 % yaitu dan Tahun 2023 yaitu sebesar 2,40 % terjadi peningkatan harga pada Tahun 2023, namun Koefisien Varian Harga masih masuk dalam standard yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk komoditi beras yaitu ≤ 5%, kondisi Koefisien Varian Harga pada Tahun 2023 di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa harga masih relatif stabil untuk komoditi beras.

Koefisien Keragaman (CV) adalah simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Semakin besar koefisien keragaman, maka data semakin fluktuatif. Penyebab fluktuatif harga disebabkan oleh ketersediaan beras medium baik yang diproduksi oleh daerah sendiri maupun yang didatangkan dari provinsi lain cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang tahun. Disamping itu, sebagian masyarakat di Kalimantan Tengah ada menyukai jenis beras lokal yang diproduksi daerah sendiri.

Grafik III. 1
Rata-Rata Harga Per Bulan Tingkat Eceran Tahun 2023



Permasalahan dalam stabilisasi harga pangan pokok adalah:

- Pada Tahun 2023 Koefisien Keragaman (CV) lebih besar dari Tahun 2022 hal ini pengaruh dari kenaikan harga bahan pangan menyebabkan fluktuasi inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Beberapa komoditi pangan hasil budidaya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang disebabkan antara lain adalah karena berbagai keterbatasan penerapan hasil kajian/rekomendasi teknis budidaya spesifikasi lokasi dengan aplikasi lapangan untuk petani pelaku usaha budidaya, teknis bertani, permodalan, fenomena perubahan iklim, dukungan dan komitmen pihak terkait untuk membangun ketahanan pangan wilayah sampai dengan tingkat rumah tangga.
- Harga pangan strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional khususnya menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal di kota Palangka Raya pada beberapa komoditas mengalami kenaikan namun masih

dalam batas yang wajar, seperti kenaikan bawang merah, cabe merah dan daging sapi. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan untuk konsumsi masyarakat saat menjelang puasa, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Natal.

- Tahun 2023 komoditas yang mengalami kenaikan menyebabkan tingginya inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah akibat pasokan menurun yaitu : beras, minyak goreng, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah dan bawang putih bonggol mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan gula dan tepung terigu kenaikan harga masih dalam batas normal.

Alternatif pemecahan masalah dalam untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok terutama komoditi beras masyarakat dan beberapa bahan pangan strategis di Kalimantan Tengah adalah :

- Melakukan monitoring harga, sebaiknya pasokan masuknya barang juga perlu dimonitoring mengingat tingginya ketergantungan Kalimantan Tengah terhadap daerah lain.
- Mendorong kemandirian pangan Kalimantan Tengah melalui program-program kerja dinas/instansi teknis terutama untuk komoditas dengan volatilitas harga yang tinggi seperti cabe merah dan bawang merah.
- Ketersediaan dan pasokan harus dijaga oleh dinas teknis sehingga tidak terjadi kelangkaan yang dapat mempengaruhi perkembangan inflasi. Peningkatan produksi lokal akan membantu ketersediaan komoditas tersebut.
- Distribusi pangan dioptimalkan melalui pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan. Disamping itu, pengaturan-pengaturan tata niaga juga ditujukan untuk mengoptimalkan kecepatan distribusi barang. Dengan demikian *handicap* daerah terkait distribusi barang dapat dikurangi.
- Pelaksanaan menstabilkan harga maka perlu melakukan langkah-langkah antisipatif dengan menggalakkan kegiatan intervensi pasar melalui operasi pasar sehingga stabilitas harga dapat terjaga.

c. Neraca Bahan Makanan (NBM)

NBM menunjukkan ketersediaan bahan pangan untuk setiap komoditas dan olahannya yang lazim dikonsumsi penduduk berdasarkan sumber penyediaan dan penggunaannya. NBM menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita per tahun (kg/kapita/tahun), serta dalam gram per kapita per hari (gram/kapita/hari). Selanjutnya untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi tersebut, maka angka ketersediaan bahan makanan per kapita per hari diterjemahkan ke dalam satuan energi, protein, dan lemak.

Neraca Bahan Makanan dibuat dalam analisis neraca bahan makanan dalam bentuk Dokumen Analisis Neraca Bahan Makanan yang disusun berdasarkan data-data konsumsi bahan makanan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel III. 6
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Neraca Bahan Makanan (NBM)
Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan							
No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target (Dokumen)	Realisasi (Dokumen)	Capaian (Dokumen)	Target Kkal/Kapita / Hari	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)						
	- Angka Ketersediaan Energi (AKE)	2.575	3.071	119,26	2.625	2.562	225,86
		Target Gram/Kapita/ Hari	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target Gram/Kapita/ Hari	Realisasi (%)	Capaian (%)
	- Angka Ketersediaan Protein (AKP)	63	102,53	162,75	63	142,29	225,86

Permasalahan terbatasnya kemampuan petugas yang memadai dalam pengambilan data lapangan dan penyusun berupa jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per gr/kapita/hari dan lemak per gr/kapita/hari.

Alternatif pemecahan masalah diperlukan peningkatan kapasitas petugas dalam pengambilan data lapangan dengan melaksanakan pelatihan dan workshop petugas pengambil data dan penyusun NBM sehingga informasi ketersediaan pangan ini akan semakin akurat.

Sasaran 2: Terwujudnya Diversifikasi Pangan

a. Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Kalimantan Tengah

Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam konsep PPH akan diperoleh skor ideal sebesar 100, yang artinya kualitas konsumsi pangan penduduk disebut ideal apabila mempunyai skor PPH sebesar 100. Sedangkan di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi dapat diketahui dengan melakukan penilaian konsumsi pangan, melalui pendekatan penghitungan porsi.

Tabel III.7
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Skor PPH
Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran 2 : Terwujudnya Diversifikasi Pangan							
No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target (Skor)	Realisasi (Skor)	Capaian (%)	Target (Skor)	Realisasi (Skor)	Capaian (%)
1	Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	88,3	87,2	87,2	90,4	88,3	97,7

Penetapan PPH bertujuan untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) berdasarkan cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affordability*). Sedangkan analisa situasi pangan bertujuan untuk mengkaji pola pangan secara regional dengan membandingkan antara ketersediaan (NBM) regional dan Pola Pangan Harapan (PPH) baik PPH Nasional maupun PPH regional.

Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan menggunakan data ketersediaan pangan yang diperoleh dari hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) yang telah disusun pada tahun yang sama. Data ketersediaan pangan yang telah dikumpulkan terlebih dahulu dikelompokkan sesuai dengan pengelompokan pada Pola Pangan Harapan (PPH).

Realisasi Nilai Skor PPH pada Tahun 2023 sebesar 88,3 dan pada Tahun 2022 sebesar 87,2 dari angka tersebut diketahui bahwa Skor PPH naik pada Tahun 2023, yang mengindikasikan bahwa pada Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kenaikan keberagaman untuk bahan konsumsi pangan Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) serta terindikasi penyertaan peningkatan kecukupan pangan masyarakat.

Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut juga diamanatkan oleh undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam pasal 60 UU No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

Permasalahan yang menjadi kendala dalam penghitungan skor PPH adalah keterbatasan jenis makanan jadi dan makanan yang dikonsumsi diluar rumah yang terdapat dalam kuesioner susenas dan jika menggunakan metode "recall" seminggu berpotensi terjadinya under/over estimate data konsumsi pangan yang di ingat oleh

responden. Maka dari itu diperlukan harmonisasi perhitungan skor PPH konsumsi pangan melalui teknik justifikasi perubahan kuesioner dan trend data susenas. Permasalahan juga menjadi terjadi Pola pangan versi FAO-RAPA ini nampaknya belum cocok bila diterapkan langsung di Indonesia karena porsi energi dari hewani sangat tinggi yaitu 20 %. Meningkatnya juga inflasi telah mengubah pola konsumsi beragam masyarakat dan beralih kepada konsumsi prioritas pada pangan pokok yaitu beras.

Alternatif Pemecahan masalah meningkatkan promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan keberagaman konsumsi pangan dan mengurangi ketergantungan pada konsumsi prioritas pangan pokok. Alternatif untuk perhitungan dengan Versi FAO-RAPA adalah perlu dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yang tidak memerlukan lemak setinggi ukuran tersebut, tetapi cukup apabila energi dari lemak sekitar 18 – 20 % dan energi dari protein sekitar 10 – 12 %, sedangkan sisanya sekitar 66 – 72 % disediakan oleh karbohidrat. Berkenaan dengan itu sumbangan energi dari pangan hewani cukup sekitar 15 %, tidak perlu sampai 20 % yang justru dapat menimbulkan kemungkinan meningkatnya masalah gizi lebih.

Diharapkan Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 mampu mencapai target Pola Pangan Harapan sebesar 100 sesuai standar Susunan Pola Pangan Harapan Nasional.

b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan

Kegiatan diversifikasi ditujukan untuk meningkatkan produksi pangan pokok alternative/lokal selain beras, penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok alternative yang berimbang dan bergizi serta berbasis pada pangan lokal. Diversifikasi dilakukan dengan mempercepat implementasi teknologi pasca panen dan pengolahan pangan lokal yang telah diteliti ke dalam industri. Diversifikasi/Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk

dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumberdaya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganeekaragaman konsumsi pangan akan mendorong pengembangan ragam sumber pangan, utamanya tanaman sumber karbohidrat, protein dan zat gizi mikro, serta ternak dan ikan sebagai sumber protein. Selain itu akan dapat menumbuhkan beragam usaha pengolahan pangan usaha rumah tangga, kecil, menengah dan usaha besar. Upaya penganeekaragaman konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi Pemerintah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan.

Tabel III. 8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kelompok Penganeekaragaman Konsumsi (P2KP) Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran 2 : Terwujudnya Diversifikasi Pangan							
No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target (Kelompok)	Realisasi (Kelompok)	Capaian (%)	Target (Kelompok)	Realisasi (Kelompok)	Capaian (%)
1	Jumlah Kelompok Penganeekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	20	31	155	22	4	18

Kegiatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang dilaksanakan pada Tahun 2023, mempromosikan produk pangan lokal segar maupun olahan khas Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan ini pula dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang beraneka ragam olahan menu masakan/kudapan berbahan pangan lokal.

Pada Tahun 2023 realisasi pelaksanaan Kegiatan kelompok Penganeekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan melalui kelompok-kelompok P2KP yang berjumlah 4 Kelompok. Dibandingkan dengan Tahun 2022 terdapat penurunan jumlah realisasi kelompok, hal ini disebabkan

realisasi anggaran sehingga ketersediaan anggaran hanya dapat melaksanakan pada 4 kelompok.

Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui kegiatan P2KP masih kurang optimal dalam pelaksanaan kegiatan oleh kelompok, maka peran tim teknis sangat dibutuhkan sebagai pembimbing untuk berjalannya kegiatan ini dengan baik. Pembinaan langsung ke lokasi oleh petugas kab/kota dan Provinsi masih kurang optimal, mengingat keterbatasan anggaran dan lokasi tersebar di beberapa lokasi dalam satu kabupaten/kota dan yang sebagian sulit dijangkau.

Permasalahan dalam Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi P2KP, masih kurang pengawasan terhadap perkembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena terkendala biaya pengawasan yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota.

Alternatif pemecahan masalah dengan meningkatkan pengawasan peningkatan jumlah anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengawasan oleh Kabupaten/kota terhadap semua kelompok yang ada di daerahnya agar kegiatan dapat terealisasi sesuai rencana dan tepat sasaran.

Sasaran 3 : Terwujudnya Keamanan Pangan Segar

a. Persentase Jumlah Sampel Pangan Segar yang Aman dengan Jumlah Sampel yang Diambil

Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis. Kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kerawanan pangan dapat meningkatkan risiko berbagai bentuk malnutrisi. Salah satu elemen penting yang membantu menjelaskan hal ini adalah makanan yang dimakan orang: khususnya, kualitas makanan. Kerawanan pangan dapat memengaruhi kualitas makanan dengan berbagai cara, berpotensi menyebabkan kekurangan gizi serta kelebihan berat badan dan obesitas.

Penyusunan diet sehat yang tepat berbeda-beda tergantung pada karakteristik individu, konteks budaya, ketersediaan makanan lokal, dan kebiasaan diet, tetapi prinsip dasar tentang diet sehat tetap sama. Ketidakmungkinan untuk menentukan makanan dan jumlah tertentu yang terdiri dari pola makan sehat untuk semua negara dan kurangnya data yang dapat dibandingkan lintas negara tentang asupan makanan individu, menimbulkan tantangan untuk penilaian global tentang konsumsi makanan dan kualitas makanan.

Untuk menjamin keamanan pangan disuatu Negara menurut FAO/WHO adalah sebagai berikut : Legislasi dibidang pangan, penanganan keamanan pangan, pelayanan pengumpulan Hasil panen adalah merupakan lokasi harus didekatkan dengan tempat pemanenan, agar tidak terjadi penyusutan atau penurunan kualitas akibat pengangkutan dari dan ketempat penampungan yang berlaku lama/jauh, antara lain adalah :

- 1) Sortasi dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan komoditas yang dipanen dalam bentuk normal dan baik (tidak mengalami kerusakan fisik).
- 2) Pembersihan/pencucian digunakan standar baku mutu air (standar air minum) untuk mencuci.
- 3) Pengemasan adalah untuk melindungi/mencegah komoditi dari kerusakan mekanis, menciptakan daya tarik bagi konsumen dan memberikan nilai tambah produk serta memperpanjang daya simpan produk.
- 4) Pelabelan produk harus diberikan sesuai dengan kelas mutunya, nama produksi, nama produsen, tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa serta berat bersih.

Tabel III. 9
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Sampel Pangan Segar
Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran 3 : Terwujudnya Keamanan Pangan Segar							
No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	90	90	90	90,5	90	96,6

Kegiatan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dan Pengawasan Keamanan Segar sebagai berikut :

- a. Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Provinsi.
- b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Kabupaten Kota.
- c. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota.
- d. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota.
- e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sebagai kegiatan mencegah dan tindak lanjut berbagai penyimpangan dari kemungkinan adanya bahaya keamanan pangan yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dalam pangan segar dengan tujuan untuk menjamin keamanan pangan segar yang beredar dilingkungan masyarakat. Pangan yang beredar harus layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat sehingga masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik, sehingga dapat mendukung terjaminnya pengembangan pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan

manusia. Semakin tinggi persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil, maka tingkat keamanan pangan segar semakin baik.

Pada Tahun 2023 jumlah sampel pangan segar yang aman dengan realisasi sebesar 90 % sedangkan pada Tahun 2022 sebesar 90 %.

Permasalahan akibat realisasi anggaran mengakibatkan menurunnya jumlah sampel yang dapat di uji, serta dengan terbatasnya alat rapid test cepat sehingga pengujian sampel pangan segar tidak dapat dilaksanakan secara cepat.

Alternatif pemecahan masalah dengan menganggarkan biaya sesuai dengan kebutuhan pengambilan sampel dan penyediaan alat rapid test sehingga yang telah ditargetkan dalam dokumen renstra dapat tercapai.

b. Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan

Terwujudnya pelaku usaha pangan asal tumbuhan diharapkan dapat menguatkan kelembagaan keamanan pangan segar, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, melakukan sosialisasi bagi petugas yang menangani keamanan pangan segar, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai keamanan pangan segar, meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan segar yang aman bagi masyarakat.

Tabel III. 10
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Pelaku Usaha Pangan Asal Tumbuhan
Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran 3 : Terwujudnya Keamanan Pangan Segar							
No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target (Pelaku)	Realisasi (Pelaku)	Capaian (%)	Target (Pelaku)	Realisasi (Pelaku)	Capaian (%)
1	Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	250	250	100	260	365	140,38

Jumlah Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) baik Pelaku Usaha Perorangan atau Organisasi yang bergerak dibidang rantai pangan di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 realisasi sejumlah 365 pelaku usaha, Tahun 2023 jumlah realisasi Pelaku Usaha Pangan Asal Tumbuhan melebihi target yang telah ditetapkan, untuk pelaku usaha asal tumbuhan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebanyak 250 pelaku usaha maka terdapat penambahan 115 pelaku usaha baru asal tumbuhan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui dukungan dana APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

Permasalahan kurangnya keamanan terutama buah dan sayuran segar merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat (produsen dan konsumen). Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan menciptakan sistem pemantauan dan pengawasan yang terpadu. Produsen/petani kurang berperan dalam menghasilkan produk yang aman dan bermutu, sedangkan konsumen kurang selektif dalam memilih produk pangan yang aman untuk dikonsumsi. Penggunaan bahan kimia dalam budidaya sayur dan buah untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman yang belum memenuhi ketentuan budidaya yang baik, akan melemahkan daya saing produk pertanian baik dalam perdagangan nasional dan internasional.

Alternatif pemecahan masalah untuk masalah di atas diperlukan sistem pengawasan yang berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir, dengan dukungan sumber daya yang memadai seperti petugas yang berkompeten dan terlatih.

Sasaran 4 : Penanganan Daerah Rawan Pangan

a. Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan melalui penyediaan data/informasi untuk penanganan masalah gangguan pangan yang berpeluang muncul setiap saat. Perkembangan situasi pangan dapat cenderung menjadi tidak menentu dan sulit dipastikan, baik sebagai akibat pengaruh alam maupun oleh adanya gejala instabilitas seperti krisis ekonomi, sosial dan politik. Prinsip-prinsip yang selanjutnya

digunakan sebagai penuntun dalam upaya pengembangan SKPG di Indonesia, antara lain : (a) SKPG dikembangkan secara bertahap dengan memperhatikan tujuan-tujuan SKPG yang hendak dicapai, (b) pengembangan SKPG dipusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi prioritas, (c) pengembangan SKPG semaksimal mungkin memanfaatkan apa yang sudah ada, baik data maupun organisasi.

Tabel III. 11
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran 4 : Penanganan Daerah Rawan Pangan							
No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	≤ 20	1,47	1,47	≤ 20	1,47	1,47

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai merupakan sarana tersedianya informasi situasi pangan dan gizi Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat penting sebagai bahan rekomendasi kebijakan ketahanan pangan dan gizi. Instrumen SKPG yang disusun diharapkan akan meningkatkan kewaspadaan pangan dan gizi dalam mendukung ketahanan pangan. Hasil SKPG dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan investigasi untuk menentukan tingkat kedalaman kejadian kerentanan pangan dan gizi di lapangan serta intervensi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Penyusunan Dokumen analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) telah dilaksanakan dengan optimal melalui analisis SKPG yang memusatkan pada salah satu masalah gizi yang penting dan menjadi prioritas.

Permasalahan Analisis SKPG masih terdapat kendala dalam pengumpulan data sebagai bahan analisis data SKPG dan masih kurangnya investigasi yang mendalam untuk melihat keakuratan data SKPG dan melihat sejauh mana kejadian

rawan pangan dan gizi terjadi di suatu wilayah dan masih kurangnya intervensi sebagai bentuk tindakan untuk menangani kejadian rawan pangan dan gizi.

Alternatif pemecahan masalah di atas adalah dengan melaksanakan pelatihan SKPG untuk mengakomodir petugas di Kabupaten/kota. Dengan demikian akan tersedianya tenaga terlatih dalam melaksanakan pengumpulan data, peningkatan peran kabupaten/kota terkait dalam pelaksanaan investigasi yang mendalam untuk melihat keakuratan data SKPG dan melihat sejauh mana kejadian rawan pangan dan gizi terjadi di suatu wilayah dan hal terpenting adalah peran Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan intervensi sebagai bentuk tindakan untuk menangani kejadian rawan pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis SKPG di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)

Salah satu tugas Dinas ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah adalah melaksanakan koordinasi, identifikasi dan menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA*) Provinsi Kalimantan Tengah yang terus dilakukan pemutakhiran setiap tahun.

Sejalan dengan pemekaran wilayah, ketersediaan data, dan perkembangan wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan pembangunan, maka Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 telah melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran ini dilakukan agar potret ketahanan dan kerentanan pangan di tingkat wilayah dapat digambarkan secara lebih akurat. Pemutakhiran dilakukan melalui penyempurnaan indikator, data, serta metode komposit. Akurasi peta terus ditingkatkan agar permasalahan dan tantangan yang menyebabkan terjadinya masalah pangan, kemiskinan dan *stunting* dapat dilakukan intervensi program/kegiatan secara lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.

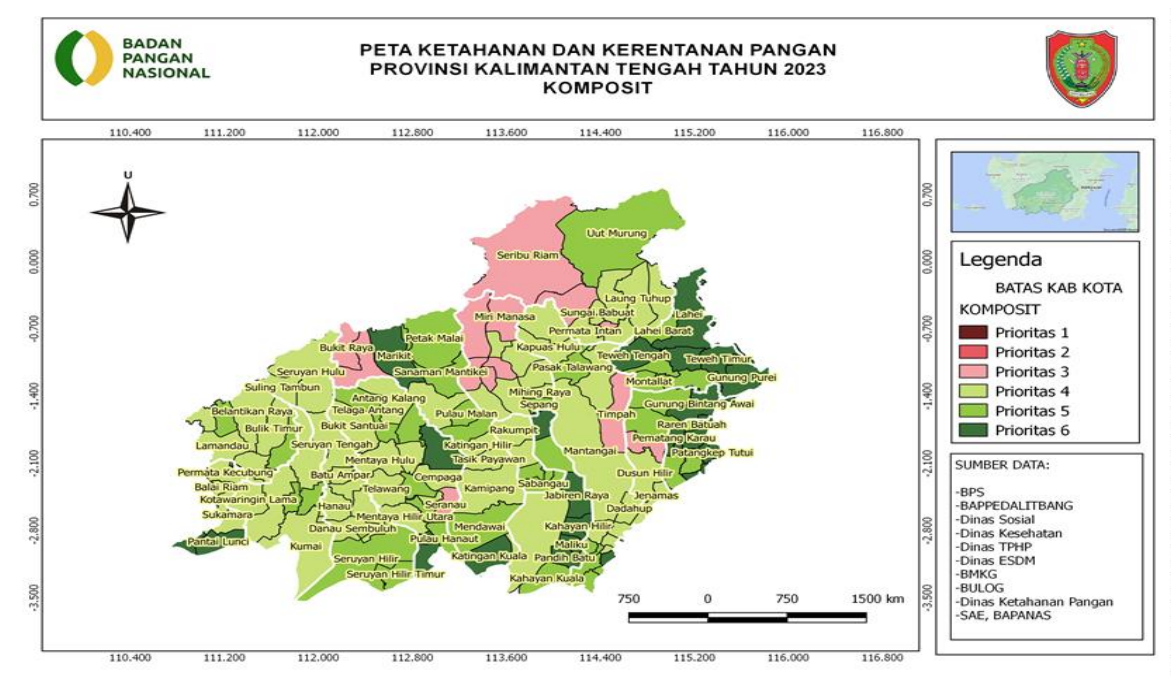
Berdasarkan analisis komposit diketahui bahwa program pembangunan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah secara umum menunjukkan keadaan yang tahan pangan. Namun, bukan berarti Provinsi Kalimantan Tengah bebas dari kerentanan pangan. Masih ada beberapa indikator yang tetap harus diwaspadai agar

tidak terjadi kerentanan pangan. Diantaranya adalah ketersediaan pangan bersih perkapita per hari, penduduk dibawah garis kemiskinan, rumah tangga dengan pengeluaran untuk pangan ≤ 65 % total pengeluaran, rumah tangga tanpa air bersih, angka kesakitan jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, rata-rata lama sekolah perempuan diatas 15 Tahun dan persentase balita stunting.

Tabel III.12
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Analisis
Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran 4 : Penanganan Daerah Rawan Pangan							
No	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Analisis Food Security and Vulnerability Atlss (FSVA)	≤ 20	1,47	1,47	≤ 20	1,47	1,47

Gambar III. 1
Komposit FSVA



Permasalahan utama yang ditemukan pada daerah yang terindikasi rentan rawan pangan, secara lebih khusus, kecamatan-kecamatan dalam kelompok rentan rawan pangan di wilayah Kabupaten Prioritas diindikasikan oleh:

- 1) tingginya rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita,
- 2) tingginya rumah tangga tanpa akses air bersih,
- 3) tingginya rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk,
- 4) tingginya angka kesakitan penduduk, dan
- 5) masih tingginya prevalensi stunting pada balita

Alternatif pemecahan masalah tersebut adalah disarankan untuk mencegah terjadinya kerawanan diperlukan program/kegiatan yang dapat :

- 1) menurunkan rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita,
- 2) Meningkatkan akses air bersih,
- 3) Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan pada daerah penduduk,
- 4) Meningkatkan angka sehat penduduk, dan
- 5) Menurunkan prevalensi stunting pada balita

Program-program peningkatan ketahanan pangan dapat diarahkan pada kegiatan :

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra pangan dengan mengoptimalkan lahan marginal dan ruang terbuka untuk produksi sesuai potensi sumberdaya lokal.
- b. Sosialisasi dan penyuluhan tentang gizi dan pola asuh anak; penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan sanitasi untuk menurunkan prevalensi stunting dan peningkatan gizi masyarakat.
- c. Penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit) dan pemberian bantuan sosial.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih.
- e. Pemerataan penyediaan tenaga kesehatan.
- f. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan perempuan.

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas konsumsi pangan adalah melalui pencapaian skor PPH. Pola konsumsi pangan yang ideal secara nasional digambarkan dengan skor PPH 100.

Untuk mencapai konsumsi energi dan PPH yang ideal perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dan sumber karbohidrat lainnya.

Hasil Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 untuk nilai Skor Pola Pangan Harapan adalah 88,3. Dibandingkan dengan Skor Ideal Nasional maka nilai Skor PPH Dinas Ketahanan Pangan Provinsi berada dibawah Skor PPH Ideal Nasional sebesar 11,7 point. Hasil skor PPH tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberagaman kelompok pangan masih rendah dan untuk mencapai keberagaman yang ideal dan memenuhi angka kecukupan gizi (AKG) yang dianjurkan, maka yang perlu ditingkatkan lagi keberagaman pangan.

Meskipun tren konsumsi umbi-umbian mengalami peningkatan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber karbohidrat. Hal ini menyebabkan jumlah agregat kebutuhan konsumsi beras masyarakat masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan konsumsi energi penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan. Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Dari analisis dan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dengan 4 (Empat) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama serta 2 Sub Indikator Indikator Kinerja Utama (Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) pada Tahun 2023,

dengan mencapai target ada 6 (enam) Indikator Kinerja dan yang belum mencapai target ada 4 (empat) Indikator Kinerja.

Tabel III. 13
Analisis Target, Realisasi dan Capaian Kinerja
Berdasarkan Sasaran Strategis dan indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Dokumen Renstra (Target Tahun 2023)	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja	Ket.
				Target	Realisasi	(%)	
1.	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi	Ton	60,5	119,83	198	Tercapai
		b. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras	%	≤ 5	2,40	48	Tercapai
		c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)					
		- Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Kkal/Kapita/Hari	2.625	2.562	97,6	Belum Tercapai
		- Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Gram/Kapita / Hari	63	142,29	225,86	Tercapai
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	Skor	90,4	88,3	97,7	Belum Tercapai
		b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kelompok	22	4	18	Belum Tercapai
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	%	90,5	90	99,6	Belum Tercapai
		b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	Pelaku	260	365	140,38	Tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Dokumen Renstra (Target Tahun 2023)	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja	Ket.
				Target	Realisasi	(%)	
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	%	≤ 20	1,47	1,47	Tercapai
		b. <i>Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)</i>	%	≤ 20	1,47	1,47	Tercapai

a. Faktor – faktor yang menunjang keberhasilan tersebut yaitu :

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab program dan kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah menjadi target pada Tahun 2023. Hal ini dibuktikan dengan tingkat ketercapaian realisasi fisik 100 % maupun realisasi keuangan dari seluruh program yang dilaksanakan selama Tahun 2023 yang seluruhnya tercapai 93,20 %.
2. Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah dalam Penyediaan cadangan pangan daerah berupa pengadaan beras sebanyak 119,83 Ton pada Tahun 2023 untuk stabilitas harga serta menurunkan kenaikan angka inflasi daerah.
3. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras harus berada di bawah angka ≤ 5 dan capaian Dinas Ketahanan Pangan adalah pada angka 2,40 mengindikasikan bahwa harga beras masih stabil.
4. Angka Ketersediaan Protein (AKP) pada angka 142,29 melebihi dari target pada angka 63 hal ini memberikan informasi protein bagi masyarakat dengan tingkat konsumsi tercukupi.
5. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan dalam target 260 dengan jumlah realisasi pelaku 365, indikator ini merupakan peningkatan pelaku usaha pangan segar dengan pertumbuhan yang baik.

6. Pengembangan pangan lokal melalui gerakan diversifikasi pangan terutama mendukung ketersediaan aneka ragam bahan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat dalam rangka ketahanan pangan.
7. Kesadaran masyarakat untuk menjadikan pekarangan sebagai penghasil pangan semakin meningkat, sehingga perkembangan jumlah kelompok tani dalam tahap penumbuhan atau pemula semakin meningkat.

b. Faktor – faktor yang menghambat keberhasilan diantaranya :

1. Laboratorium pengujian mutu dan keamanan pangan bahan pangan belum memiliki alat uji yang lengkap, diantaranya untuk menentukan kadar dan ambang batas pestisida dalam suatu komoditas serta masih membutuhkan peralatan untuk melakukan pengujian yang lebih valid atau komprehensif test terhadap pengujian bahan pangan.
2. Angka Ketersediaan Energi (AKE) masih dibawah target disebabkan penurunan pola konsumsi pangan masyarakat.
3. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah pola konsumsi pangan berubah di tingkat keluarga dan individu, asupan makanan sesuai prinsip konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) untuk memenuhi kebutuhan zat gizi.
4. Kurangnya data ketersediaan, pasokan dan keluar masuk bahan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah karena terlalu banyaknya akses keluar masuk barang, menyebabkan sulitnya analisa neraca bahan makanan dalam perhitungan ketersediaan bahan pangan.
5. Masih ditemukan daerah yang terindikasi rentan rawan pangan, secara lebih khusus, kecamatan-kecamatan dalam kelompok rentan rawan pangan.
6. Terlambatnya pengiriman data dan informasi dari kabupaten/kota karena masalah signal/jaringan yang jelek karena menggunakan aplikasi dalam pengiriman data pemantauan harga ke provinsi.
7. Faktor penyebab lain daerah rentan rawan pangan diantaranya produksi pertanian, *stunting*, air bersih, pengetahuan ibu balita, akses listrik, tenaga kesehatan, pengeluaran rumah tangga dan angka morbiditas.

c. Upaya solusi yang dilakukan :

Dinas Ketahanan Pangan terus melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan melibatkan stakeholder dan OPD terkait lain untuk turut serta mengawasi ketersediaan pangan dan distribusi pangan melalui SATGAS pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Meningkatkan Koordinasi dengan dan pengawasan secara terfokus dan kontinyu, terutama dalam pengambilan sampel dan pengujian mutu dan keamanan bahan pangan asal tumbuhan dengan membentuk Tim OKKPD dengan melibatkan OPD terkait lainnya.
3. Melakukan koordinasi dengan pengelola anggaran dalam usaha pencapaian target- target yang ditetapkan baik yang merupakan target fisik maupun keuangan.
4. Melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program kegiatan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Peningkatan kemampuan petugas keamanan pangan melalui pelatihan pengambilan sampel.
6. Mempertahankan kinerja yang telah baik, Terus meningkatkan kinerja yang masih dapat diperbaiki.

6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

Penggunaan sumber daya akan dikatakan efisien apabila persentase capaian realisasi fisik menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi keuangan.

Tabel III. 14
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.086.370.512	Jumlah dokumen, perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	9	Dokumen	9	Dokumen	7.183.159.574	88,83	100,00			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.001.101	Jumlah dokumen, perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan	9	Dokumen	9	Dokumen	172.092.962	99,48	100,00	1,00	173.001.101,00	908.139,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.001	jumlah dokumen program dan kegiatan tahun berjalan	2	Dokumen	2	Dokumen	99.347.862	99,35	100,00			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	15.000.000	jumlah dokumen penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	14.844.100	98,96	100,00			

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	8.001.000	jumlah dokumen penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	8.000.800	100,00	100,00			
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	25.000.000	jumlah dokumen penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	24.962.000	99,85	100,00			
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	15.000.100	jumlah dokumen penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	14.997.200	99,98	100,00			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	Jumlah laporan realisasi indikator dan evaluasi Kinerja SKPD yang mencapai sasaran	2	Dokumen	2	Dokumen	9.941.000	99,41	100,00			

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.679.095.900	Jumlah Dokumen,ASN penerima gaji dan tunjangan, laporan bulanan, semester dan tahunan	3	Dokumen	3	Dokumen	5.849.633.492	87,58	100,00	1,00	6.679.095.900,00	829.462.408,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.484.485.500	Terbayarnya Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang	44	Orang	5.657.471.792	87,25	100,00			
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	175.700.000	Jumlah orang pelaksana administrasi tugas ASN	10	Orang	10	Orang	173.299.800	98,63	100,00			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.910.400	Jumlah laporan realisasi keuangan SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	12.868.500	99,68	100,00			

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6.000.000	Jumlah laporan realisasi keuangan per semester SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	5.993.400	99,89	100,00			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.000.000	Jumlah laporan aset barang daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	25.999.795	92,86	100,00	1,00	28.000.000,00	2.000.205,00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.000.000	Jumlah laporan aset barang daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	25.999.795	92,86	100,00			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	2	Orang	2	Orang	840.000	16,80	100,00	1,00	5.000.000,00	4.160.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5.000.000	Jumlah ASN yang mengikuti	2	Orang	2	Orang	840.000	16,80	100,00			

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		pendidikan dan pelatihan formal										
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.471.500	Persentase kinerja internal yang terlayani dengan baik	100	Persen	100	Persen	294.183.630	98,56	100,00	1,00	298.471.500,00	4.287.870,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	Jumlah unit komponen listrik penerangan	100	Unit	100	Unit	9.998.000	99,98	100,00			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	25	Unit	25	Unit	14.881.500	99,21	100,00			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000	Jumlah unit cetak dan penggandaan keperluan kantor tahun berjalan	1	Paket	1	Paket	12.999.900	100,00	100,00			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	44.000.000	Jumlah unit langganan harian surat	1	Layanan	1	Layanan	39.840.000	90,55	100,00			

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15	16	17	18	19	20	21	
	Perundang undangan		kabar dan jumlah buku tahun berjalan										
	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216.471.500	Jumlah koordinasi, sinkronisasi, pelatihan pada luar dan dalam daerah	28	Kali	28	Kali	216.464.230	100,00	100,00			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92.120.000	Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	9	Unit	9	Unit	89.960.000	97,66	100,00	1,00	92.120.000,00	2.160.000,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.120.000	Jumlah pengadaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	9	Unit	9	Unit	89.960.000	97,66	100,00			
	Penyediaan Jasa Penunjang	643.827.011	Persentase kinerja internal yang	100	Persen	100	Persen	597.704.014	92,84	100,00	1,00	643.827.011,00	46.122.997,00

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15	16	17	18	19	20	21	
	Urusan Pemerintah Daerah		terlayani dengan baik										
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	Jumlah surat menyurat tahun berjalan	1000	Surat	1000	Surat	4.989.800	99,80	100,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.247.011	Jumlah rekening tagihan listrik, telepon dan internet yang dibayarkan	1	Tahun	1	Tahun	188.179.207	85,44	100,00			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	10	Unit	10	Unit	4.994.500	99,89	100,00			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413.580.000	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	1	Tahun	1	Tahun	399.540.507	96,61	100,00			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	166.855.000	Jumlah pemeliharaan mesin Roda 4 dan Roda 2 dan mesin	52	Unit	52	Unit	152.745.681	91,54	100,00	1,00	166.855.000,00 14.109.319,00	

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
	Pemerintahan Daerah		lainnya										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.000.000	Jumlah kendaraan Dinas perorangan/jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5	Unit	5	Unit	77.753.414	95,99	100,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.788.000	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	47	Unit	47	Unit	56.356.060	88,35	100,00			
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan	22.067.000	Jumlah perbaikan dan pemeliharaan	1	Unit	1	Unit	18.636.207	84,45	100,00			

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		sarana dan prasarana kantor lainnya										
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	15.300.000	Jumlah pengembangan desa mandiri pangan	2	Kelompok	2	Kelompok	9.750.000	63,73	100,00			
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	15.300.000	Jumlah pengembangan desa mandiri pangan	2	Kelompok	2	Kelompok	9.750.000	63,73	100,00	1,00	15.300.000,00	5.550.000,00
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung	15.300.000	Jumlah pengembangan desa	2	Kelompok	2	Kelompok	9.750.000	63,73	100,00			

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
	Kemandirian Pangan Lainnya		mandiri pangan										
3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6.641.024.605	Jumlah dokumen laporan, Jumlah kelompok Wanita Tani dan Kelompok Distribusi Pangan	4	Laporan	4	Laporan	6.539.179.949	98,47	100,00			
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka	5.624.182.705	Jumlah dokumen laporan, Jumlah kelompok Wanita Tani dan Kelompok Distribusi Pangan	4	Laporan	4	Laporan	5.542.955.706	98,56	100,00	1,00	5.624.182.705,00	81.226.999,00

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan												
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	25.000.000	Jumlah dokumen laporan	1	Laporan	1	Laporan	21.481.500	85,93	100,00			
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	85.000.000	Jumlah kelompok ibu menyusui dan Ibu hamil yang mengikuti kegiatan dan jumlah kelompok wanita pangan lokal	2	Kegiatan	2	Kegiatan	82.267.600	96,79	100,00			
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	45.000.000	Jumlah laporan pemantauan Analisis Akses Pangan dan laporan pemantauan distribusi	1	Laporan	1	Laporan	32.338.700	71,86	100,00			

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
			pangan										
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	4.518.428.425	jumlah Dokumen Laporan pemantaun Analisis Tren Harga Pangan Pokok	1	Laporan	1	Laporan	4.499.542.776	99,58	100,00			
	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	950.754.280	Jumlah Kelompok Lembaga distribusi pangan	9	Kelompok	9	Kelompok	907.325.130	95,43	100,00			
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	790.341.900	Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	65	Ton	65	Ton	778.314.720	98,48	100,00	1,00	790.341.900,00	12.027.180,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan	15.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	1	Dokumen	1	Dokumen	13.249.500	88,33	100,00			

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
	Pangan Provinsi		Cadangan Pangan Provinsi										
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	15.000.000	Jumlah dokumen Penetapan Sasaran Produksi Pangan daerah (TPH,Bun,Nak,Ikan)	1	Laporan	1	Laporan	14.526.000	96,84	100,00			
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	760.341.900	Pengembangan cadangan pangan pemerintah provinsi	65	Ton	65	Ton	750.539.220	98,71	100,00			
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai	226.500.000	Jumlah kegiatan, jumlah peserta, jumlah laporan	1	Laporan	1	Laporan	217.909.523	96,21	100,00	1,00	226.500.000,00	8.590.477,00

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
	dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi												
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	80.000.000	jumlah Ekspose dan Promosi Pembangunan Ketahanan Pangan Daerah	4	Kegiatan	4	Kegiatan	79.249.223	99,06	100,00			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman B2SA	125.000.000	Sosialisasi Diversifikasi Pangan bagi Kelompok Wanita Tani Pemanfaatan Pekarangan dan Jumlah Kegiatan Promosi Diversifikasi Pangan Masyarakat/P	35	Peserta	35	Peserta	117.191.300	93,75	100,00			

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
			2KP										
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	21.500.000	jumlah Dokumen Laporan Terlaksananya Analisis Pola Pangan Harapan	1	Laporan	1	Laporan	21.469.000	99,86	100,00			
4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50.000.000	Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan	3	Laporan	3	Laporan	49.516.700	99,03	100,00			
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	35.000.000	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG)	2	Laporan	2	Laporan	34.520.900	98,63	100,00	1,00	35.000.000,00	479.100,00

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
	Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota	35.000.000	Jumlah laporan analisis dan peta (FSVA) dan situasi pangan dan gizi (SKPG) Jumlah Laporan Analisis dan Peta Situasi Pangan dan Gizi (SKPG)	2	Laporan	2	Laporan	34.520.900	98,63	100,00			
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	15.000.000	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan Pemantauan daerah Rawan Pangan	1	Laporan	1	Laporan	14.995.800	99,97	100,00	1,00	15.000.000,00	4.200,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan	15.000.000	Jumlah Laporan identifikasi, investigasi, dan	1	Laporan	1	Laporan	14.995.800	99,97	100,00			

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
	Pangan Provinsi		Pemantauan daerah Rawan Pangan										
5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	90.000.000	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	90,5	Persen	90,5	Persen	89.296.000	99,22	100,00			
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten Kota	90.000.000	Persentase sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	90,5	Persen	90,5	Persen	89.296.000	99,22	100,00	1,00	90.000.000,00	704.000,00
	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	20.000.000	Jumlah Peserta Pelatihan Petugas Pengambil	35	Peserta	35	Peserta	19.797.000	98,99	100,00			

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
			Contoh										
	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota	20.000.000	Jumlah hasil OKKPD dan penagawasan keamanan pangan segar	4	Sertifikasi	4	Sertifikasi	19.970.500	99,85	100,00			
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota	20.000.000	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Pangan Lokal	3	Register	3	Register	19.678.500	98,39	100,00			
	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota	15.000.000	Jumlah sampel mutu keamanan pangan segar dan olahan yang diteliti	25	Sampel	25	Sampel	14.988.700	99,92	100,00			

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Target			Realisasi 31 Desember 2023					Capaian Kinerja	PAGU x Capaian Kinerja	(Pagu x CK) - Realisasi
			Output/Outcomes	0	Satuan	Volume Output/outcomes	Satuan	Keuangan (Rp)	%	Fisik (%)			
1	2	3	4	5	6	15		16	17	18	19	20	21
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	15.000.000	Jumlah sarana dan prasarana laboratorium keamanan pangan segar	2	Unit	2	Unit	14.861.300	99,08	100,00			
	PAGU TOTAL*	14.882.695.117						13.870.902.223	93,20	100,00	15,00	14.882.695.117,00	1.011.792.894,00

$$\begin{aligned}\text{EFISIENSI} &= \frac{1.011.792.894,00}{14.882.695.117,00} \times 100 \% \\ &= 6,80\%\end{aligned}$$

$$\text{Skala Persentase Efisiensi} = 50 + (6,80/20 \times 50) = 67,0 \%$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, penghitungan efisiensi yang didapatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebesar 6,80 %. Sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017 Tahun 2017, bahwa batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%, maka dapat dikatakan penggunaan sumber daya di Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam kategori **Efisien**. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah secara efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada Tahun 2023. Dengan skala persentase efisiensi berada diangka 67,00 %.

Selama Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan berbagai upaya efisiensi lainnya adalah :

- a. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan pegawai untuk menunjang efisiensi pelaksanaan kegiatan yang profesional.
- b. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan AC, listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja, dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan.
- b. Penggunaan Sarana Mobilitas dilakukan dengan sistem penggunaan pinjam pakai dan menggunakan nota pinjam aset Dinas Ketahanan Pangan.
- c. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan dengan prinsip penganggaran.
- d. Efisiensi penggunaan keuangan dengan penganggaran dan penggunaan aplikasi yang berorientasi paperless dalam pengusulan anggaran.

- e. Pengadaan barang dilakukan melalui e-katalog untuk mencapai efisiensi anggaran.
- f. Pemeliharaan dan penggantian rutin suku cadang kendaraan bermotor.
- g. Pemeliharaan rutin gedung kantor, peralatan kantor dan lingkungan kantor untuk meningkatkan efisiensi aset.

7. PROGRAM PENUNJANG KEBERHASILAN KINERJA SASARAN DINAS

Tabel III. 15
Program Penunjang keberhasilan Kinerja Tahun 2023
Dan Target Renstra 2026

Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)	TARGET AKHIR RENSTRA 2026
Urusan Bidang Pangan							
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP		B	B	100	A
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi	Ton	60,5	119,83	198	90,5
		b. Koefisien varian harga beras/ fluktuasi harga beras	%	≤ 5	2,40	48	≤ 5
		c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)					
		- Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Kkal/ Kapita/ Hari	2.625	2.562	97,6	2.800
		- Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Gram/ Kapita/ Hari	63	142,29	225,86	63
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	Skor	90,4	88,3	97,7	92

Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)	TARGET AKHIR RENSTRA 2026
		b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kelompok	22	4	18	202
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	%	90,5	90	99,96	92
		b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	Pelaku	260	365	140,38	275
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	%	≤ 20	1,47	1,47	≤ 20
		b. <i>Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)</i>	%	≤ 20	1,47	1,47	≤ 20

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2021-2026 perlu didukung salah satunya dengan pendanaan yang mencukupi. Dalam mewujudkan kinerja organisasi yang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja maka diperlukan sumber-sumber pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah yang berasal dari APBD dan dikelola melalui program penganggaran. Program-program tersebut diselaraskan dengan implementasi perencanaan strategis yang sudah dijabarkan ke dalam seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja utamanya.

Jumlah anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan anggaran perubahan Tahun 2023 beserta realisasi keuangannya adalah :

Tabel III.16
Realisasi Pelaksanaan Program APBD Dinas Ketahanan Pangan

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE
Belanja Operasi	14.882.695.117,-	7.952.470.431,-	53.43
- Belanja Pegawai	6.657.885.500,-	5.828.471.792,-	87.54
- Belanja Barang Jasa	8.132.689.617,-	79.52.470.431,-	97.78
Belanja Modal	92.120.000,-	89.960.000,-	97.66
Jumlah	14.882.695.117,-	13.870.902.223,-	93.20
Pendapatan	13.500.000,00	13.500.000,00	100

Realisasi keuangan Tahun 2023 secara keseluruhan mencapai 93,20 % dan realisasi pendapatan mencapai 100 %.

Grafik III. 2



Grafik III. 3



Adapun realisasi anggaran per Program dan per Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

Tabel III.17
Realisasi Anggaran per Program dan per Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8,086,370,512	7,183,159,574.00	88.83	100
	A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173,001,101	172,092,962.00	99.48	100
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,000,001	99,347,862.00	99.35	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	15,000,000	14,844,100.00	98.96	100
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	8,001,000	8,000,800.00	100.00	100
	4. Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	25,000,000	24,962,000.00	99.85	100
	5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	15,000,100	14,997,200.00	99.98	100
	6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,000,000	9,941,000.00	99.41	100

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,679,095,900	5,849,633,492.00	87.58	100
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,484,485,500	5,657,471,792.00	87.25	100
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	175,700,000	173,299,800.00	98.63	100
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12,910,400	12,868,500.00	99.68	100
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6,000,000	5,993,400.00	99.89	100
	C. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28,000,000	25,999,795.00	92.86	100
	1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28,000,000	25,999,795.00	92.86	100
	D. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000	840,000.00	16.80	100
	1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5,000,000	840,000.00	16.80	100
	E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	298,471,500	294,183,630.00	98.56	100
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	9,998,000.00	99.98	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000	14,881,500.00	99.21	100
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,000,000	12,999,900.00	100.00	100
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44,000,000	39,840,000.00	90.55	100
	5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	216,471,500	216,464,230.00	100.00	100
	F. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	92,120,000	89,960,000.00	97.66	100
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92,120,000	89,960,000.00	97.66	100
	G. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	643,827,011	597,704,014.00	92.84	100
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	4,989,800.00	99.80	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220,247,011	188,179,207.00	85.44	100
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,000,000	4,994,500.00	99.89	100
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413,580,000	399,540,507.00	96.61	100
	H. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	166,855,000	152,745,681.00	91.54	100
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81,000,000	77,753,414.00	95.99	100
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional		56,356,060.00	88.35	100

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
	atau Lapangan	63,788,000			
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22,067,000	18,636,207.00	84.45	100
II.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	15,300,000	9,750,000.00	63.73	100
	A. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	15,300,000	9,750,000.00	63.73	100
	1. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	15,300,000	9,750,000.00	63.73	100
III.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	6,641,024,605	6,539,179,949.00	98.47	100
	A. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	5,624,182,705	5,542,955,706.00	98.56	100
	1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	25,000,000	21,481,500.00	85.93	100
	2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	85,000,000	82,267,600.00	96.79	100
	3. Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	45,000,000	32,338,700.00	71.86	100
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	4,518,428,425	4,499,542,776.00	99.58	100
	5. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	950,754,280	907,325,130.00	95.43	100
	B. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	790,341,900	778,314,720.00	98.48	100
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	15,000,000	13,249,500.00	88.33	100
	2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	15,000,000	14,526,000.00	96.84	100
	3. Koordinasi Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	760,341,900	750,539,220.00	98.71	100
	C. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	226,500,000	217,909,523.00	96.21	100
	1. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	80,000,000	79,249,223.00	99.06	100
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman B2SA		117,191,300.00	93.75	100

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
		125,000,000			
	3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	21,500,000	21,469,000.00	99.86	100
IV.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	50,000,000	49,516,700.00	99.03	100
	A. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	35,000,000	34,520,900.00	98.63	100
	1. Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota	35,000,000	34,520,900.00	98.63	100
	B. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	15,000,000	14,995,800.00	99.97	100
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	15,000,000	14,995,800.00	99.97	100
V.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	90,000,000	89,296,000.00	99.22	100
	A. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten Kota	90,000,000	89,296,000.00	99.22	100
	1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	20,000,000	19,797,000.00	98.99	100
	2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota	20,000,000	19,970,500.00	99.85	100
	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota	20,000,000	19,678,500.00	98.39	100
	3. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten Kota	15,000,000	14,988,700.00	99.92	100
	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	15,000,000	14,861,300.00	99.08	100
	JUMLAH	14,882,695,117.00	13,870,902,223.00	93.20	100

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah kepada publik atas pelaksanaan mandate konstitusi yang dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.

Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan 1 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pangan, yang terdiri dari 5 Program, 15 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan, yang dilaksanakan oleh 1 Sekretariat dan 3 Bidang.

Laporan ini memberikan gambaran atas upaya yang telah dilaksanakan, termasuk hambatan atau kendala, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi landasan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian sasaran dan target Dinas Ketahanan Pangan.

Hasil kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 disajikan dalam perhitungan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan dari Total Pagu Anggaran **Rp. 14.882.695.117,-** adalah sebesar **Rp. 13.870.902.223,-** dengan jumlah persentase realisasi **93,20 %**.

Pengukuran capaian penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) per jenis Belanja dan Pendapatan pada Dinas Ketahanan Pangan dengan membandingkan target dan realisasi.

Tabel IV.1
Capaian per jenis Belanja dan Pendapatan

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE
Belanja Operasi	14.882.695.117,-	7.952.470.431,-	53.43
- Belanja Pegawai	6.657.885.500,-	5.828.471.792,-	87.54
- Belanja Barang Jasa	8.132.689.617,-	79.52.470.431,-	97.78
Belanja Modal	92.120.000,-	89.960.000,-	97.66
Jumlah	14.882.695.117,-	13.870.902.223,-	93.20
Pendapatan	13.500.000,-	13.500.000,-	100

Adapun dalam upaya mendorong pencapaian target kinerja dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026, diperlukan perbaikan pengelolaan kinerja antara lain pengintegrasian antara pengelolaan kinerja organisasi dan individu, meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kinerja dan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah secara memadai kepada publik dan para pemangku kepentingan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, baik dalam aspek kinerja maupun akuntabilitas.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 2. Foto Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan
- Lampiran 3. Rekonsiliasi Stok Beras Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
- Lampiran 4. Instrumen Pendukung Kinerja

PERJANJIAN KINERJA



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Willem A.S. Nomor 9 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3221293 dan Fax (0536) 3229809 Email. perencanaanbcp@gmail.com

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. RIZA RAHMADI, MM**
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama, tahun 2021 – 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ir. RIZA RAHMADI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640723 199003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Willem A.S. Nomor 9 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3221293 dan Fax (0536) 3229809 Email. perencanaanbcp@gmail.com

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi :

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kedudukan, Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Ketahanan Pangan adalah dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi yaitu :

- Penyusunan kebijakan standard pelayanan dibidang ketahanan pangan;
- Pelaksanaan koordinasi, perencanaan, organisasi, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan program ketahanan pangan ;
- Koordinasi dan pelaksanaan analisis, pembinaan penerapan standard teknis dibidang ketahanan pangan ;
- Koordinasi dan pembinaan penerapan standard pelayanan ketahanan pangan ;
- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, fasilitasi ketahanan pangan;
- Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketahanan pangan;
- Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	<ol style="list-style-type: none">Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsiKoefisien varian harga beras/fluktuasi harga berasAnalisis Neraca Bahan Makanan (NBM)<ul style="list-style-type: none">Angka Ketersediaan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/ Hari)Angka Ketersediaan Protein (AKP) (Gram/Kapita/ Hari)	$\frac{\text{Jml Stok Awal} + \text{Pembelian}}{\text{Target}} \times 100$ <p>Data harga komoditas beras selama 1 tahun dihitung dengan menggunakan koefisien varians</p> <p>Analisis Neraca Bahan Makanan</p> <ol style="list-style-type: none">Pengumpulan data ;<ol style="list-style-type: none">Produksi dan penggunaan bibit (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan)Perubahan Stok (Bulog)Ekspor, Impor (Dishubkominfo)Pengolahan data Aplikasi NBM (excel) dengan Total Penyediaan Bahan Makanan (TS) sama dengan Total penggunaannya (TU) atau $TS=TU$Jml Ketersediaan per kapitan = Jml Makanan yg tersedia dibagi Jml pendudukKetersediaan per kapita disajikan dlm bentuk volume dan kandungan nilai gizi (kkal, energi, gram protein dan gram lemak)	<p>DKP Provinsi</p> <p>Kab/Kota</p> <p>DKP Provinsi</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Data rata-rata konsumsi menurut jenis komoditas makanan/ golongan $\frac{\text{Jml Kelompok P2KP}}{\text{Target}} \times 100$	Data Susenas BPS Kab/Kota
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	$\frac{\text{Jml Sampel yg diambil}}{\text{Target}} \times 100$ $\frac{\text{Jml Pedagang/Pelaku Usaha}}{\text{Target}} \times 100$	Kab/kota Kab/Kota
4.	Terwujudnya Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) b. <i>Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)</i>	Di analisis dengan program aplikasi SKPG, datanya al : 1. Data Komoditas Padi a. Luas tanam 1 tahun b. Luas puso 1 tahun c. Luas tanam 5 tahun terakhir d. Luas puso 5 tahun terakhir e. Harga beras bulan berjalan 2. Pemantauan status gizi balita 1. Disusun setiap tahun sekali 2. FSVA Provinsi sampai level kecamatan terakhir disusun 2022, akan diupdate tahun 2023 Tahapan perhitungannya : a. Pengumpulan data indikator : data produksi 3 tahun terakhir, persentase penduduk dibawah garis kemiskinan, proporsi nilai pengeluaran RT utk makanan, persentase RT tanpa akses listrik, rata-rata sekolah perempuan >15 tahun, persentase RT tanpa akses ke air bersih, rasio tenaga kesehatan thd 100.000 penduduk, <i>prevalence of undernourishment</i> , angka harapan hidup pada saat lahir (BPS) b. Pengumpulan data pendukung : bencana alam terkait iklim (BPNPB), variabilitas curah hujan (BMKG), hilangnya produksi padi (tanaaman pangan, deforestasi (Dishut dan DLH) c. Menghitung skor komposit dgn aplikasi excel dan mintab sehingga bisa diprioritaskan masing-masing wilayah d. Standardize data pada semua indikator e. Pemetaan menggunakan software map info 3. FSVA Kabupaten sampai level Desa terakhir disusun tahun 2022, akan diupdate tahun	Kab/Kota DKP Provinsi Kab/Kota

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
			2023 Tahapan : a. Pengumpulan data indikator : rasio warung dan toko thd RT, rasio penduduk dgn status kesejahteraan rendah, rasio RT tanpa akses listrik, desa tdk memiliki akses penghubung, rasio anak tdk sekolah, rasio RT tanpa akses air bersih, rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk, rasio RT tanpa fasilitas BAB b. Standardize data pada semua indikator c. Menghitung skor komposit dgn aplikasi exel dan mintab sehingga bisa diprioritaskan masing-masing wilayah d. Pemetaan menggunakan software map info	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Willem A.S. Nomor 9 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3221293 dan Fax (0536) 3229809 Email. perencanaanbkp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. RIZA RAHMADI, MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GOVERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka panjang menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ir. RIZA RAHMADI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640723 199003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Willem A.S. Nomor 9 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3221293 dan Fax (0536) 3229809 Email. perencanaanbkp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. RIZA RAHMADI, MM**
Jabatan : **KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka panjang menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Apabila target kinerja tidak tercapai maka kami bersedia menerima sanksi dari pimpinan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ir. RIZA RAHMADI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640723 199003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Willem A.S. Nomor 9 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3221293 dan Fax (0536) 3229809 Email. perencanaanbcp@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi b. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) - Angka Ketersediaan Energi (AKE) - Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Ton % Kkal/Kapita/ Hari Gram/Kapita/ Hari	60,5 ≤ 5 2.625 63
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kelompok	90,4 22
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	% Pelaku	90,5 260
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) b. Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	% %	≤ 20 ≤ 20

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.193.648.501	
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp. 15.300.000	
3.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 2.921.841.900	
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 50.000.000	
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 90.000.000	

Palangka Raya, Januari 2023

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ir. RIZA RAHMADI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640723 199003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Willem A.S. Nomor 9 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3221293 dan Fax (0536) 3229809 Email. perencanaanbcp@gmail.com

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. RIZA RAHMADI, MM**
Jabatan : KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ir. RIZA RAHMADI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640723 199003 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Willem A.S. Nomor 9 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3221293 dan Fax (0536) 3229809 Email. perencanaanbkp@gmail.com

A. Target Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1.	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi	Ton	60,5	100	0	0	0	
		b. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras	%	≤ 5	25	25	25	25	
		c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)							
		- Angka Ketersediaan Energi (AKE)	Kkal/Kapita/ Hari	2.625	10	20	30	40	
		- Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Gram/Kapita/ Hari	63	10	20	30	40	
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah	Kelompok	90,4	15	20	50	20	
		b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan		22	10	40	40	10	
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	%	90,5	15	35	30	20	
		b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	Pelaku	260	20	30	30	20	
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	%	≤ 20	10	30	40	20	
		b. Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	%	≤ 20	10	30	40	20	

B. Target Realisasi Keuangan

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		6.636.385.500	1.659.096.375	1.659.096.375	1.659.096.375	1.659.096.375	
	BELANJA LANGSUNG		4.634.404.901	926.880.980	1.390.321.470	1.390.321.470	926.880.980	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		8.193.648.501	1.914.916.375	2.136.536.375	2.118.397.375	2.023.798.376	
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.001.101	19.500.000	32.500.000	75.501.000	45.500.101	
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.000.001	10.000.000	30.000.000	40.000.000	20.000.001	
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.000.000	2.000.000	-	2.000.000	11.000.000	
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.001.000	-	-	8.001.000	-	
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	25.000.000	5.000.000	-	15.000.000	5.000.000	
		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.000.100	-	-	8.000.000	7.000.100	
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.837.095.900	1.704.546.375	1.706.546.375	1.706.546.375	1.719.456.775	
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.636.385.500	1.659.096.375	1.659.096.375	1.659.096.375	1.659.096.375	
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	181.800.000	45.450.000	45.450.000	45.450.000	45.450.000	
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.910.400	-	-	-	12.910.400	
		4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.000.000	8.000.000	-	10.000.000	10.000.000	
		1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	28.000.000	8.000.000	-	10.000.000	10.000.000	

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	-	-	5.000.000	-	
		1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000	-	-	5.000.000	-	
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.471.500	20.000.000	65.000.000	103.000.000	53.471.500	
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	-	5.000.000	5.000.000	-	
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	-	-	8.000.000	7.000.000	
		3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	-	5.000.000	-	5.000.000	
		4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
		5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.471.500	15.000.000	50.000.000	85.000.000	36.471.500	
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.120.000	-	92.120.000	-	-	
		1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.120.000	-	92.120.000	-	-	
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	621.480.000	152.870.000	155.370.000	157.870.000	155.370.000	
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	-	2.500.000	-	2.500.000	
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
		3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	-	-	5.000.000	-	
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	411.480.000	102.870.000	102.870.000	102.870.000	102.870.000	
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	195.480.000	10.000.000	85.000.000	60.480.000	40.000.000	
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	110.000.000	10.000.000	50.000.000	30.000.000	20.000.000	

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 2 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000	-	25.000.000	20.000.000	20.000.000	
		3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.480.000	-	10.000.000	10.480.000	-	
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		15.300.000	7.844.000	-	6.156.000	1.300.000	
		1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	15.300.000	7.844.000	-	6.156.000	1.300.000	
		1 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	15.300.000	7.844.000		6.156.000	1.300.000	
3.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		2.921.841.900	790.000.000	590.000.000	946.841.900	595.000.000	
		1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.905.000.000	75.000.000	535.000.000	795.000.000	500.000.000	
		1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	25.000.000	-	5.000.000	15.000.000	5.000.000	
		2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	85.000.000	-	15.000.000	50.000.000	20.000.000	
		3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	45.000.000	-	15.000.000	30.000.000	-	
		4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	750.000.000	25.000.000	200.000.000	200.000.000	325.000.000	
		5. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	1.000.000.000	50.000.000	300.000.000	500.000.000	150.000.000	
		2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	790.341.900	715.000.000	-	60.341.900	15.000.000	
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	15.000.000	-	-	15.000.000	-	
		2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	15.000.000	-	-	-	15.000.000	

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
		3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	760.341.900	715.000.000	-	45.341.900	-	
		3. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	226.500.000	-	55.000.000	91.500.000	80.000.000	
		1. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	80.000.000	-	20.000.000	30.000.000	30.000.000	
		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	125.000.000	-	25.000.000	50.000.000	50.000.000	
		3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	21.500.000	-	10.000.000	11.500.000	-	
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan		50.000.000	-	7.152.500	27.378.000	15.469.500	
		1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	35.000.000	-	4.402.500	15.128.000	15.469.500	
		1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	35.000.000	-	4.402.500	15.128.000	15.469.500	
		2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	15.000.000	-	2.750.000	12.250.000	-	
		1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	15.000.000	-	2.750.000	12.250.000	-	
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan		90.000.000	-	14.000.000	25.000.000	51.000.000	
		1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	-	14.000.000	25.000.000	51.000.000	
		1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	20.000.000	-	14.000.000	-	6.000.000	
		2. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	-	-	14.000.000	6.000.000	
		3. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	-	-	11.000.000	9.000.000	
		4. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	-	-	-	15.000.000	

No.	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
		5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	15.000.000	-	-	-	15.000.000	
	JUMLAH		11.270.790.401	2.712.760.375	2.747.688.875	3.123.773.275	2.686.567.876	

Palangka Raya, Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Willem A.S. Nomor 9 Palangka Raya 73111

Telp. (0536) 3221293 dan Fax (0536) 3229809 Email. perencanaanbcp@gmail.com

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Terwujudnya Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Distribusi dan Akses Pangan	a. Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah provinsi b. Koefisien varian harga beras/fluktuasi harga beras c. Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) - Angka Ketersediaan Energi (AKE) - Angka Ketersediaan Protein (AKP)	Ton % Kkal/Kapita/ Hari Gram/Kapita/ Hari	70,5 ≤ 5 2.675 63
2.	Terwujudnya Diversifikasi Pangan	a. Analisis Skor PPH Provinsi Kalimantan Tengah b. Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	Kelompok	91 24
3.	Terwujudnya keamanan pangan segar	a. Persentase jumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil b. Jumlah pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan	% Pelaku	91 265
4.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	a. Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) b. Analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)	% %	≤ 20 ≤ 20

Palangka Raya, Januari 2023

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Ir. RIZA RAHMADI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640723 199003 1 006

BERITA ACARA REKONSILIASI STOCK BERAS DINAS KETAHANAN PANGAN
NOMOR : 003/BA-REKON/BLG-DKP/11/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Tiga Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-11-2023)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Lenny**
NIP : **088408127**
Jabatan : **Plh. Pemimpin Perum BULOG Kator Wilayah Kalimantan Tengah dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG**
Selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Ir. Riza Rahmadi.M.M**
NIP : **19640723 199003 1 006**
Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah**
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Dasar :

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. ADD.005/PBLG-DKPPROV/X/2023 | (Provinsi) | Tanggal 02-10-2023 |
| 2. ADD.006/PBLG-DKPPROV/X/2023 | (Provinsi) | Tanggal 02-10-2023 |
| 3. ADD.007/PBLG-DKPPROV/X/2023 | (Provinsi) | Tanggal 02-10-2023 |
| 4. ADD.008/PBLG-DKPPROV/X/2023 | (Provinsi) | Tanggal 02-10-2023 |
| 5. ADD.009/PBLG-DKPPROV/X/2023 | (Provinsi) | Tanggal 02-10-2023 |
| 6. ADD.003/PBLG-DKPPKATINGAN/X/2023 | (Katingan) | Tanggal 02-10-2023 |
| 7. ADD.004/PBLG-DKPPKATINGAN/X/2023 | (Katingan) | Tanggal 02-10-2023 |
| 8. ADD.005/PBLG-DKPPKATINGAN/X/2023 | (Katingan) | Tanggal 02-10-2023 |
| 9. ADD.001/PBLG-DPKP/VIII/2023 | (Kotawaringin Barat) | Tanggal 29-08-2023 |
| 10. ADD.002/PBLG-DPKP/VIII/2023 | (Kotawaringin Barat) | Tanggal 29-08-2023 |
| 11. ADD.0001/PJB-CPPD/IX/2023 | (Kotawaringin Timur) | Tanggal 23-10-2023 |

Dengan ini **PIHAK KESATU** telah melakukan rekonsiliasi sisa Perjanjian Jual Beli Beras (PJB) yang belum diterbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB/SO) untuk **PIHAK KEDUA** sampai dengan posisi penyaluran per tanggal **13 November 2023**. Hasil rekonsiliasi sisa PJB yang belum diterbitkan SPPB/SO-nya sebanyak **213.779,75 kg** dengan rincian terlampir.

Demikian Berita Acara Serah Rekonsiliasi penyaluran beras ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Ir. Riza Rahmadi.M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19640723 199003 1 006

PIHAK KESATU,

Lenny
NIP. 088408127

LAMPIRAN BERITA ACARA
Rekonsiliasi Stok Beras Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
Di Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah
Per Tanggal 13 November 2023

NO.	Data menurut Dinas Ketahanan Pangan			Data Menurut Kantor Wilayah			Harga Satuan	Jumlah Harga	Selisih Kuantum	Keterangan
	No. Prinlog/PJB	Tanggal	Kuantum (Kg)	No. Prinlog/PJB	Tanggal	Kuantum (Kg)	Rp/kg	Rp	Kg	
I	DKP Prov. Kalteng									
1	PJB-002/PBLG-BKPKP/XI/2018									
	ADD 001/PBLG-DKP/II/2021									
	ADD 002/PBLG-DKP/II/2021									
	ADD 001/PBLG-DKP/II/2022									
	ADD 002/PBLG-DKPPROV/II/2023									
	ADD 005/PBLG-DKPPROV/X/2023*	02-10-2023	5,389.03	ADD.005/PBLG-DKPPROV/X/2023	02-10-2023	5,389.03	11,002.00	59,290,156.52	-	
2	PJB-001/PBLG-BKPKP/X/2019									
	ADD 002/PBLG-DKP/II/2021									
	ADD 003/PBLG-DKP/II/2021									
	ADD 002/PBLG-DKP/II/2022									
	ADD 003/PBLG-DKPPROV/II/2023									
	ADD 006/PBLG-DKPPROV/X/2023*	02-10-2023	1,994.63	ADD.006/PBLG-DKPPROV/X/2023	02-10-2023	1,994.63	11,002.00	21,944,880.00	-	
3	PJB-002/PBLG-DKP/XI/2021									
	ADD 003/PBLG-DKP/II/2022									
	ADD 004/PBLG-DKPPROV/II/2023									
	ADD 007/PBLG-DKPPROV/X/2023*	02-10-2023	3,695.05	ADD.007/PBLG-DKPPROV/X/2023	02-10-2023	3,695.05	11,002.00	40,652,975.00	-	
4	PJB-001/PBLG-DKP/II/2022									
	ADD 001/PBLG-DKPPROV/II/2023									
	ADD 008/PBLG-DKPPROV/X/2023*	02-10-2023	43,764.77	ADD.008/PBLG-DKPPROV/X/2023	02-10-2023	43,764.77	11,002.00	481,500,000.00	-	
5	PJB-001/PBLG-DKPPROV/II/2023									
	ADD 009/PBLG-DKPPROV/X/2023*	02-10-2023	64,988.18	ADD.009/PBLG-DKPPROV/X/2023	02-10-2023	64,988.18	11,002.00	715,000,000.00	-	
	Jumlah I		119,831.67			119,831.67		1,318,388,011.62	-	
II	DP3 Kab. Katingan									
1	PJB-001/PBLG-DP3/VIII/2021									
	ADD 001/PBLG-DP3/VIII/2021									
	ADD 001/PBLG-DP3/II/2022									
	ADD 001/PBLG-DKP/II/2023									
	ADD 003/PBLG-DKPPKATINGAN/X/2023*	02-10-2023	9,760.18	ADD.003/PBLG-DKPPKATINGAN/X/2023	02-10-2023	9,760.18	11,002.00	107,381,490.00	-	
2	PJB-001/PBLG-DP3/IV/2022									
	ADD 002/PBLG-DKP/II/2023									
	ADD 004/PBLG-DKPPKATINGAN/X/2023*	02-10-2023	20,836.18	ADD.004/PBLG-DKPPKATINGAN/X/2023	02-10-2023	20,836.18	11,002.00	229,239,679.00	-	
3	PJB-001/PBLG-DKPPKATINGAN/V/2023									
	ADD 005/PBLG-DKPPKATINGAN/X/2023*	02-10-2023	7,440.47	ADD.005/PBLG-DKPPKATINGAN/X/2023	02-10-2023	7,440.47	11,002.00	81,860,000.00	-	
	Jumlah II		38,036.83			38,036.83		418,481,169.00	-	
III	DKP Kab. Kotawaringin Barat									
1	PJB-01/SUBDIVPB-PPKP/X/2014									
	ADD 001/PBLG-DKP/VII/2021									
	ADD 001/PBLG-DKP/II/2022									
	ADD 001/PBLG-DKPK/VIII/2023*	29-08-2023	8,619.96	ADD.001/PBLG-DKPK/VIII/2023	29-08-2023	8,619.96	11,002.00	94,836,859.32	-	
2	PJB-01/SUBDIVPB-BKPKP/XI/2015									
	ADD 002/PBLG-DKP/VII/2021									
	ADD 002/PBLG-DKP/II/2022									
	ADD 002/PBLG-DKPK/VIII/2023*	29-08-2023	2,876.20	ADD.002/PBLG-DKPK/VIII/2023	29-08-2023	2,876.20	11,002.00	31,644,000.00	-	
	Jumlah III		11,496.16			11,496.16		126,480,859.32	-	
IV	DKP Kab. Kotawaringin Timur									
1	0001/PJB-CPBD/VI/2023									
	ADD 0001/PJB-CPPD/IX/2023*	23-10-2023	44,415.10	ADD 0001/PJB-CPPD/IX/2023	23-10-2023	44,415.10	11,002.00	488,655,000.00	-	
	Jumlah IV		44,415.10			44,415.10		488,655,000.00	-	
	Jumlah I + II + III + IV		213,779.75			213,779.75		2,352,005,039.84	-	

Ket *Addendum Perbaikan harga di tahun 2022 sejumlah Rp.10.859,- menjadi Rp.11.002,- di tahun 2023 dan Penyesuaian Kuantum.



Palangka Raya, 13 November 2023
 Perum BULOG
 Kantor Wilayah Kalimantan Tengah
 Pih. Pemimpin Wilayah,

NIP. 088408127



Rencana Capaian Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Periode Tahun 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Terakhir	Keterangan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Jumlah cadangan pangan pokok pemerintah Provinsi	5,05	47,5	50,5	60,5	70,5	80,5	90,5	90,5	-
2	Koefisien varian harga beras / fluktuasi harga beras	≤ 5%	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5%	≤ 5 %	≤ 5 %	-
3	Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) :									-
	- Angka Ketersediaan Energi (AKE) (Kkal/Kapita/Hari)	3.000	2.400	2.575	2.625	2.675	2.725	2.800	2.800	
	- Angka Ketersediaan Protein (AKP) (Gram/Kapita/Hari)	63	63	63	63	63	63	63	63	
4	Skor PPH provinsi Kalimantan Tengah	83,8	85,5	88,3	90,4	91	91,5	92	92	-
5	Jumlah Kelompok Penganekaragaman Konsumsi (P2KP) / Diversifikasi Konsumsi Pangan	30 kelompok	83 kelompok	20 Kelompok	22 kelompok	24 kelompok	26 kelompok	30 kelompok	202 kelompok	-
6	Persentase sejumlah sampel pangan segar yang aman dengan jumlah sampel yang diambil	88%	88,5%	90%	90,5%	91%	91,5%	92%	92%	-
7	Jumlah pelaku usaha pangan asal tumbuhan	245 pelaku	245 pelaku	250 pelaku	260 pelaku	265 pelaku	270 pelaku	275 pelaku	275 pelaku	-
8	Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) (%)	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	-
9	Analisis Food Security and Vulneraby Atlas (FSVA) (%)	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	≤ 20%	-